



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kabupaten Pacitan, 19 September 2025

Kepala Dinas Perikanan



BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, MM

NIP. 19680920 199901 1 001

Pembina Tingkat I



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	10
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perikanan	11
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap.....	11
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya.....	12
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan.....	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	14
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	60



2.1.3.1	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	60
2.1.3.2	Hasil Evaluasi Capaian Anggaran	66
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	69
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	74
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	76
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	76
2.2.2	Isu Strategis.....	84
2.2.2.1	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	84
2.2.2.2	Telaahan Renstra Provinsi	85
2.2.2.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	85
2.2.2.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	87
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	94
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	94
3.2	Strategi Perangkat Daerah	104
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	118
3.4	Pentahapan Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan ..	125
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	129
4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	129
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	197
BAB V	PENUTUP	222
5.1	Kesimpulan.....	222
5.2	Kaidah Pelaksanaan	222
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	224



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 2.3 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	19
Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten..... Pacitan.....	20
Tabel 2.5 KIB A (Tanah) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	21
Tabel 2.6 KIB B (Peralatan dan Mesin) Sarana dan Prasarana Dinas..... Perikanan Kabupaten Pacitan.....	23
Tabel 2.7 KIB C (Gedung dan Bangunan) Sarana dan Prasarana Dinas..... Perikanan Kabupaten Pacitan.....	40
Tabel 2.8 KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	48
Tabel 2.9 KIB E (Aset Tetap Lainnya) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	59
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	61
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	67
Tabel 2.12 Kelompok Sasaran Layanan.....	70
Tabel 2.13 Mitra Perangkat Daerah.....	74
Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.....	77
Tabel 2.15 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan ditinjau dari implikasi RTRW.....	86
Tabel 2.16 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi..... Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis.....	86



Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan.....	
Kabupaten Pacitan.....	99
Tabel 3.2 Perumusan Strategi Sasaran 1 Bidang Perikanan Tangkap.....	104
Tabel 3.3 Perumusan Strategi Sasaran 1 Bidang Perikanan Budidaya	107
Tabel 3.4 Perumusan Strategi Sasaran 2	109
Tabel 3.5 Penentuan Strategi	112
Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	119
Tabel 3.7 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan.....	
Kabupaten Pacitan.....	126
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra... PD.....	130
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan..... Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	155
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas..... Pembangunan Daerah	211
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	219
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	228



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	14
Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	103



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Selain itu Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspaspial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);



17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 150), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 79).



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.




BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perikanan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja serta rencana kegiatan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset serta urusan rumah tangga Dinas.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok pengelolaan penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan, pemberdayaan nelayan kecil serta Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan penangkapan ikan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan sumber daya ikan;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan nelayan kecil;
- d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok produksi dan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi produksi dan usaha perikanan budidaya;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

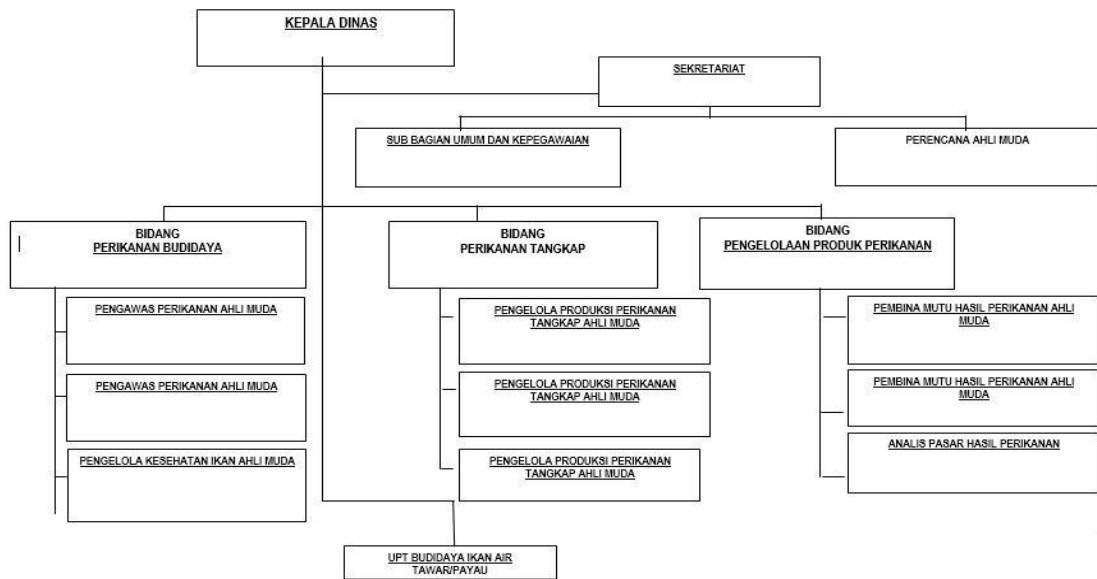


2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan

Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan mempunyai tugas pokok mutu dan diversifikasi produk perikanan, pelayanan usaha perikanan, promosi dan logistik perikanan. Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi meliputi bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan usaha perikanan;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi promosi dan logistik perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan adaah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN	+/-
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kabid Perikanan Tangkap	0	1	-1



4	Kabid Perikanan Budidaya	1	1	0
5	Kabid Pengelolaan Produk Perikanan	1	1	0
6	Kasubag Umpeg	1	1	0
7	Kepala UPT Budidaya Ikan	0	1	-1
8	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	2	2	0
9	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	1	6	-5
10	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha / Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
11	Pengelola Statistik Perikanan / Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
12	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan / Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
13	Penyusun Rencana Perancang Konservasi Jenis Ikan/ Penelaah teknis Kebijakan	0	1	-1
14	Pengelola Data / Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
15	Pengelola Pengawasan Sumber Daya Kelautan/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
16	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
17	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	1	1	0
18	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
19	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	0	2	-2
20	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir	0	5	-5
21	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	0	8	-8
22	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	0	6	-6
23	Juru Pungut Retribusi / Operator Layanan Operasional	0	5	-5
24	Operator Layanan Operasional*	10	12	-2
25	Pengelola Umum Operasional*	4	4	0
26	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya	0	1	-1
27	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	1	2	-1
28	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	3	-2



29	Pengelola Statistik Perikanan/ Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
30	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
31	Analisis Perikanan Budidaya / Penata Kelola kelautan dan Perikanan	1	1	0
32	Penyusun Rencana Bahan Teknis Sarana dan Prasarana Budidaya/ Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
33	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
34	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya/ Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
35	Pengelola Laboratorium / Operator Laboratorium	0	1	-1
36	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan / Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
37	Pengelola Data / Pengolah data dan Informasi	0	1	-1
38	Pengelola Pengawasan Pembudidaya Ikan / Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
39	Pengawas Perikanan Ahli Madya / Analisis Akuakultur Ahli Madya	0	2	-2
40	Pengawas Perikanan Ahli Muda / Analisis Akuakultur Ahli Muda	2	3	-1
41	Pengawas Perikanan Ahli Pertama / Analisis Akuakultur Ahli Pertama	1	3	-2
42	Teknisi Akuakultur Pemula	0	1	-1
43	Teknisi Akuakultur Terampil	0	1	-1
44	Teknisi Akuakultur Mahir	0	1	-1
45	Teknisi Akuakultur Penyelia	0	1	-1
46	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	1	1	0
47	Operator Layanan Operasional*	2	2	0
48	Analisis Budidaya Perikanan / Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
49	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan / Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	2	-2
50	Pramu Benih Ikan / Operator Layanan Operasional	0	2	-2
51	Teknisi Akuakultur Pemula	0	1	-1
52	Teknisi Akuakultur Terampil	0	1	-1
53	Operator Layanan Operasional*	6	6	0



54	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya	0	1	-1
55	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	2	3	-1
56	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	1	3	-2
57	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	0	1	-1
58	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	0	2	-2
59	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	2	-2
60	Analisis Mutu Hasil Perikanan/ Penelaah teknis Kebijakan	0	1	-1
61	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
62	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Hasil Perikanan / Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
63	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
64	Pengelola Statistik Perikanan / Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
65	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan/ Penelaah teknis Kebijakan	0	1	-1
66	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan/ Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	0	1	-1
67	Fasilitator Promosi / Fasilitator Perdagangan	0	1	-1
68	Asisten Pembina Mutu hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	0	2	-2
69	Asisten Pembina Mutu hasil Kelautan dan Perikanan Mahir	0	1	-1
70	Asisten Pembina Mutu hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia	0	1	-1
71	Analisis Pasar hasil Perikanan Mahir	0	1	-1
72	Analisis Pasar hasil Perikanan Penyelia	0	1	-1
73	Operator Layanan Operasional*	2	2	0
74	Kustodian Barang Milik Negara / Penelaah teknis Kebijakan	1	1	0
75	Pengadministrasi Kepegawaian / Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0



76	Pengadministrasi Umum / Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
77	pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas / Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
78	Petugas Keamanan / Operator Layanan Operasional	0	3	-3
79	Pengemudi / Operator Layanan Operasional	0	1	-1
80	Arsiparis Terampil	0	1	-1
81	Pengelola Umum Operasional	1	1	0
82	Operator Layanan Operasional*	2	2	0
83	Perencana Ahli Muda	1	1	0
84	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
85	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
86	Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
87	Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
88	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
89	Statistisi Ahli Pertama	0	1	-1
90	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
91	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
92	Pengelola Keuangan / Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
93	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan / Pengolah data dan Informasi	0	1	-1
94	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
95	Perencana Ahli Pertama	0	1	-1
96	Operator Layanan Operasional*	2	4	-2
	Jumlah	55	168	-113

Sesuai Analisa beban kerja dibutuhkan 168 SDM, sedangkan kondisi eksisting jumlah pada Dinas Perikanan untuk PNS dan Non ASN sebanyak 55 atau hanya tersedia SDM 32,74 % dari kebutuhan.

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	PNS Golongan I	-	-	-
2	PNS Golongan II	1	-	1
3	PNS Golongan III	9	5	14
4	PNS Golongan IV	4	1	5



No	Golongan	L	P	Jumlah
5	PPPK Golongan V	1	-	1
6	PPPK Golongan VII	-	1	1
7	PPPK Golongan IX	1	3	4
8	Penyuluh Perikanan ASN*	9	5	14
9	Penyuluh Perikanan Non ASN*	2	-	2
10	Non ASN	23	16	39
Jumlah		50	31	81

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Keterangan * : Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga kedepannya diperlukan pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta langkah-langkah penguatan melalui peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Perikanan sebanyak 81 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	3	-	3
2	SMP Sederajat	-	-	3	1	4
3	SMA Sederajat	3	-	12	9	24



No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
4	D2	-	-	1	-	1
5	D3	3	2	-	-	5
6	D4	-	-	3	-	3
7	S1	17	13	2	5	37
8	S2	4	-	-	-	4
Jumlah		27	15	24	15	81

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sarjana S-1, yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	Bidang (M2)	27.492	1.014.403.300
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	unit	456	4.187.149.960
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	paket	119	12.361.946.821,92



4	KIB D	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	buah	144	19.041.693.338
5	KIB E	Aset tetap lainnya	paket	1	168.923.000
Total					36.774.116.420

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, adapun nilai aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan per 30 Juni 2025 sebesar 38.111.112.198 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Kemudian sarana dan prasarana serta perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai penunjang tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah tertera sebagai berikut:

Tabel 2.5 KIB A (Tanah) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

No	Nama Barang	Luas (M2)	Jumlah	Letak (Lokasi Alamat)	Penggunaan	Harga
1	Tanah kampung	1.165,00	1	Rt 3 RW X Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan	Tanah PPI Tamperan (Kel Sidoharjo)	120.000.000
2	Tanah kampung	7.761,00	1	Jl. Raya Ketro Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan	Tanah BBI (Desa Jati Gunung)	77.610.000,00
3	Tanah bangunan kantor pemerintah	1.370,00	1	Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan	Tanah Kantor Dinas Perikanan	342.500.000



No	Nama Barang	Luas (M2)	Jumlah	Letak (Lokasi Alamat)	Penggunaan	Harga
4	Tanah Untuk Bangunan Pabrik Es	2.266,00	1	Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan	Pabrik es	292.075.000
5	Tanah bangunan rumah penjaga	2.750,00	1	Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro	Tanah Trans Lokal Sukorejo Sudimoro	20.000.000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.191,00	1			27.393.000
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	4.307,00	1			25.411.300
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.095,00	1			13.140.000
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	467	1			17.604.000
10	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	786	1	Lingkungan Tamperan Kel. Sidoharjo	Bangunan Pertokoan	26.662.000
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.088,00	1			13.056.000
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	613	1			7.356.000
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2.633,00	1			31.596.000
Total						1.014.403.300



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel KIB A Tanah Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tercatat 13 bidang tanah bersertifikat dengan nilai total sebesar Rp. 1.014.403.300

Tabel 2.6 KIB B (Peralatan dan Mesin) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
1	Suction Dredger	1	Suction trap	2012	16.500.000,00
2	Portable Generating Set	1	Genset dan Istalater	2019-11-20	23.776.500,00
3	Sumersible Pump	2	Pompa Celup	2008	2.435.400,00
4	Pompa Air	1	Pompa Obahan	2018-12-19	1.000.000,00
5	Pompa Air	1	Pompa Obahan	2019-11-20	1.875.500,00
6	Pompa Air	1	Pompa Obahan	2019-11-20	1.875.500,00
7	Pompa Air	1	Pompa air	2019-11-20	907.500,00
8	Pompa Air	2		2020-04-20	2.420.000,00
9	Pompa Air	1		2021-03-10	880.000,00
10	Pompa Air	2		2022-06-22	2.664.000,00
11	Pompa Air	1		2024-11-20	1.450.000,00
12	Pompa Air	1	Surya Guna Tulungagung Jet 300	2024-11-20	1.450.000,00
13	Alat Pompa Lainnya	2	Surya Guna Tulungagung Jet 300	2022-07-07	1.998.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
14	Tanks (Tabung Selam)	2	Tabung Oxygen	2013-12-25	8.954.000,00
15	Regulator Instruments	2	Regulator selam	2013-12-25	5.953.200,00
16	Baju Selam	2		2013-12-25	1.887.600,00
17	Station Wagon	1	Toyota Kijang Inova	2006	187.000.000,00
18	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Micro Bus (L300)	2014-12-08	319.326.000,00
19	Pick Up	1		2007	174.000.000,00
20	Pick Up	1		2014	81.000.000,00
21	Sepeda Motor	1	Suzuki Bravo RC 100	1994	6.500.000,00
22	Sepeda Motor	1	Honda Win	1995	4.000.000,00
23	Sepeda Motor	1	Honda Kirana ND 125	2003	13.000.000,00
24	Sepeda Motor	1	Honda Win MCB 97 WIN	2003	12.000.000,00
25	Sepeda Motor	1	Honda GL Max	2003	16.900.000,00
26	Sepeda Motor	1	Honda Win	2003	12.000.000,00
27	Sepeda Motor	1	HONDA WIN 100 GL MAX 125	2004	12.000.000,00
28	Sepeda Motor	1	Supra X NF 125 TD	2006	15.000.000,00
29	Sepeda Motor	3		2008	45.000.000,00
30	Sepeda Motor	1	Supra X NF 125 TD	2009	18.900.000,00
31	Sepeda Motor	10		2010	152.020.000,00
32	Sepeda Motor	1	Fit X NF 11B2D1 NF 11B2D1 MT	2011	15.080.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
33	Sepeda Motor	1	HONDA NF112BD1 MT	2011	15.080.000,00
34	Sepeda Motor	1	HONDA Fit X NF 11B2D1 MT	2011	15.080.000,00
35	Sepeda Motor	1		2011	18.385.000,00
36	Sepeda Motor	1		2013-12- 20	14.632.000,00
37	Sepeda Motor	1		2013-12- 20	14.632.000,00
38	Sepeda Motor	1		2014-11- 29	14.800.000,00
39	Gerobak Dorong	2	Gerobak Dorong	2019-12- 19	17.200.000,00
40	Kapal Motor	1	filbet	2018-04- 24	16.819.000,00
41	Kapal Patroli Pantai	1		2013-12- 24	185.800.000,00
42	Mesin Jahit Kulit	1	Mesin Jahit Kulit	2007	4.350.000,00
43	Mesin Kompresor	1	Mesin Kompresor	2009	165.000.000,00
44	Oil Separator	1	Oil separator	2012	11.000.000,00
45	Accumulator	1	Accumulator	2012	11.000.000,00
46	NH 3 Vale	1	NH 3 Vale	2012	52.250.000,00
47	Electro Motor	1	Electro motor	2012	27.500.000,00
48	NH 3 Piping & Fiting	1	NH 3 Piping and fitting	2012	25.850.000,00
49	Water Piping	1	Water piping	2012	35.750.000,00
50	Hering Bone Evaporator	1	Hering bone evaporator	2012	110.000.000,00
51	Brine Talk	1	Brine talk	2012	121.000.000,00
52	Insulator	1	Insulator	2012	14.300.000,00
53	Brine Agitator	1	Brine Agicator	2012	13.475.000,00
54	Dip Tank	1	Dip tank	2012	18.700.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
55	Can Filling	1	Cap filling	2012	19.250.000,00
56	Can Dumper	1	Can dumper	2012	17.600.000,00
57	Wodden	1	Wooden	2012	19.250.000,00
58	Ice Can Frame	1	Ice can frame	2012	22.440.000,00
59	Ice Can	1	Ice Can	2012	184.800.000,00
60	Electric Overhead	1	electric overhead	2012	66.000.000,00
61	Air Blower	1	Blower	2012	44.000.000,00
62	Bak Air	2	Bak Air	2010	3.000.000,00
63	Engine Stand	2	Genset	2018-08-20	14.036.000,00
64	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
65	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
66	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
67	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
68	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
69	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
70	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
71	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
72	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
73	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	1	Timbangan Meja	2019-11-27	1.500.000,00
74	Timbangan Bbi Capasitas 100 Kg	8	Timbangan duduk	2018-12-17	32.000.000,00
75	Timbangan Bbi Capasitas 10 Kg	6	Timbangan Meja	2018-12-17	3.600.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
76	Timbangan Cepat Capasitas 25 Kg	7	remajda	2022-05- 27	8.741.250,00
77	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1	Timbangan duduk	2017-07- 14	3.000.000,00
78	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	4	Timbangan duduk	2017-12- 07	14.000.000,00
79	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1	Timbangan duduk	2019-05- 31	4.000.000,00
80	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1	Timbangan duduk	2019-11- 27	4.000.000,00
81	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1	Timbangan duduk	2019-11- 27	4.000.000,00
82	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1	Timbangan duduk	2019-11- 27	4.000.000,00
83	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1	Timbangan duduk	2019-11- 27	4.000.000,00
84	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	2		2021-11- 04	8.000.300,00
85	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	2		2021-11- 04	9.900.000,00
86	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	1		2021-11- 04	3.135.000,00
87	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	4		2021-11- 04	4.999.700,00
88	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	3	Remajda Duduk 500 Kg	2022-06- 20	11.988.000,00
89	Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg	2	Remadja Super -	2025-06- 04	6.220.000,00
90	Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg (Alat Timbangan/biara)	2	QME -	2025-06- 04	10.600.000,00
91	Timbangan Cepat Capasitas 500 Kg	4	Remaja Super	2024-12- 18	17.600.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
92	Timbangan Cepat Capasitas 300 Kg	2	Oris duduk digital 300 Kg	2022-06- 20	8.991.000,00
93	Timbangan Cepat Capasitas 300 Kg	2	Duratron T73	2023-05- 22	8.950.000,00
94	Timbangan Cepat Capasitas 300 Kg	1	Remaja	2024-12- 11	5.925.000,00
95	Timbangan Cepat Capasitas 300 Kg	1	Remaja	2024-12- 11	5.925.000,00
96	Timbangan Cepat Capasitas 300 Kg	2	Digitech DB-15	2024-12- 18	11.850.000,00
97	Timbangan Duduk Digital 40 Kg	2		2022-07- 07	2.664.000,00
98	Timbangan Duduk Digital 40 Kg	1	logix logix	2023-05- 22	1.480.000,00
99	Timbangan Duduk Kapasitas 150 Kg	2		2022-12- 13	8.436.000,00
100	Timbangan Duduk Kapasitas 150 Kg	1	duratron	2024-03- 28	4.900.000,00
101	Timbangan Duduk Kapasitas 500 Kg	1		2022-12- 13	3.414.000,00
102	Timbangan Duduk Kapasitas 500 Kg	2	duratron T73	2023-05- 22	11.900.000,00
103	Timbangan Duduk Kapasitas 500 Kg	2		2023-10- 23	9.000.000,00
104	Timbangan Duduk Kapasitas 500 Kg	3	Duratron	2024-03- 28	13.200.000,00
105	Timbangan Duduk Kapasitas 500 Kg	3	Duratron	2024-09- 23	13.200.000,00
106	Rak-Rak Penyimpan	2	Rak Penyimpan Alat	2009	2.000.000,00
107	Bak Fiber	1	bak fiber	2009	1.000.000,00
108	Bak Fiber	1	bak fiber	2009	1.000.000,00
109	Bak Fiber	1	bak fiber	2009	1.000.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
110	Keramba (Jaring Apung)	1	keramba jaring apung	2011	66.000.000,00
111	Media Transparasi Terumbu Karang	3	Media Traspalasi Trubukarang buatan	2013-12-25	9.801.000,00
112	Cooler Box	1	Coolbox	2015-05-05	907.500,00
113	Wadah Panen	8	Wadah panen Fiberglas	2018-06-06	11.132.000,00
114	Kincir Air	1		2021-03-10	7.150.000,00
115	Lemari Besi/Metal	1	Hitachi	1988	500.000,00
116	Lemari Besi/Metal	1	Elite	2000	500.000,00
117	Lemari Besi/Metal	1	Brother	2005	2.000.000,00
118	Lemari Besi/Metal	1	Brother	2005	2.000.000,00
119	Lemari Besi/Metal	1	Brother	2005	2.000.000,00
120	Lemari Kayu	1	Lemari Kayu	2000	750.000,00
121	Lemari Kayu	1	Lemari Kayu	2009	1.500.000,00
122	Lemari Kayu	1	Lemari Kayu	2012	2.491.500,00
123	Rak Besi	1	Rak besi / Tempat TV	2011	500.000,00
124	Filing Cabinet Besi	1	filing kabinet	2008	1.277.100,00
125	Brandkas	1	ICHIBAN	1981	2.000.000,00
126	Brandkas	1	ROYAL	2005	5.000.000,00
127	Brandkas	1	ROYAL	2005	5.000.000,00
128	Lemari Kaca	2	Lamari	2011	3.980.000,00
129	Lemari Kaca	2	Lamari	2011	3.000.000,00
130	Lemari Kaca	1	KAYU	2014-09-19	2.500.000,00
131	Lemari Kaca	1	KAYU	2014-09-19	2.500.000,00
132	Lemari Kaca	1	KAYU	2015-03-16	3.630.000,00
133	Etalase	1	KACA	2000	1.000.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
134	Etalase	1	KACA	2005	2.000.000,00
135	Etalase	1	KACA	2006	500.000,00
136	Etalase	2	Kaca/Etalase 200	2008	3.357.750,00
137	Etalase	1	lemari/rak	2008	1.318.680,00
138	Mesin Absensi	1	Fingerspot Revo 163 BNC	2018-02- 22	1.870.000,00
139	Perforator Besar	1	Blong Besar kerangka besi	2011	1.246.025,00
140	Perforator Besar	1	Blong Besar kerangka besi	2011	1.246.025,00
141	LCD Projector/Infocus	1	Epson	2011	6.975.000,00
142	LCD Projector/Infocus	1	Epson	2016-12- 08	6.600.800,00
143	LCD Projector/Infocus	1	Epson EB-500 3300	2022-04- 04	6.400.000,00
144	LCD Projector/Infocus	1	Epson EB 500	2024-11- 19	6.260.000,00
145	Papan Nama Instansi	1	Besi/Papan Nama Instansi	2008	9.900.000,00
146	Meja Kerja Kayu	1		2003	500.000,00
147	Meja Kerja Kayu	1		2003	500.000,00
148	Meja Kerja Kayu	1		2009	500.000,00
149	Meja Kerja Kayu	2		2018-04- 20	1.694.000,00
150	Meja Kerja Kayu	3		2024-03- 18	6.900.000,00
151	Meja Rapat	1	KAYU	2000	1.350.000,00
152	Meja Rapat	1	KAYU	2007	1.000.000,00
153	Meja Rapat	1	KAYU	2009	550.000,00
154	Meja Resepsionis	1	1 MRC IT	2024-12- 04	8.987.115,00
155	Meja Panjang	2	Kayu/Meja Panjang	2011	2.980.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
156	Meja Makan Kayu	3	KAYU	2016-04-22	4.500.000,00
157	Kursi Rapat	4	BESI	2007	2.000.000,00
158	Mesin Pemotong Rumput	2	Potong rumput	2010	7.215.400,00
159	Mesin Pemotong Rumput	1	Potong Rumput	2018-09-21	2.500.000,00
160	Mesin Pemotong Rumput	2	cycle air cooled	2024-06-05	6.100.000,00
161	Lemari Es	1	POLYTRON	2008	2.800.000,00
162	Lemari Es	1	Refrigerator 2 Pintu	2008	3.907.200,00
163	Lemari Es	2	Refrigerator	2018-08-20	9.136.880,00
164	AC Split	1	LG	2003	7.000.000,00
165	AC Split	1	AQRA	2006	0,00
166	AC Split	1	LG	2015-03-27	4.937.125,00
167	AC Split	1	LG	2015-03-27	4.937.125,00
168	AC Split	1	LG	2015-03-27	4.937.125,00
169	AC Split	4	Panasonic YN18WKJ	2024-02-29	41.000.000,00
170	Kipas Angin	1	NATIONAL	2003	500.000,00
171	Kipas Angin	4	Miyako Miyako KSB	2024-04-19	3.200.000,00
172	Kipas Angin	2		2024-04-19	1.370.000,00
173	Kipas Angin	4	Maspion Power Fan PW1811RC	2024-04-19	2.100.000,00
174	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	Water piping	2012	25.850.000,00
175	Oven Listrik	2	Keramba	2007	7.200.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
176	Oven Listrik	1	Oven 30-50 ltr	2008	7.081.800,00
177	Tabung Gas	1	Tabung Gas	2011	2.972.750,00
178	Tabung Gas	2	Tabung gas/oksigen besar	2011	5.945.000,00
179	Tabung Gas	1		2022-12-09	575.000,00
180	Televisi	1	PANASONIC	2014-10-23	3.396.000,00
181	Televisi	1		2024-02-29	16.300.000,00
182	Mesin Jahit	1	besi	2015-05-05	3.388.000,00
183	Timbangan Barang	2	Besi	2020-04-20	1.936.000,00
184	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	KACA	2003	500.000,00
185	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	KACA	2003	500.000,00
186	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	KACA	2003	500.000,00
187	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	heater magnetic	2008	5.779.400,00
188	Backdrop	1	Dinas Perikanan	2024-12-04	36.887.885,00
189	Bracket Televisi	1		2024-02-29	2.450.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
190	Alat Pemadam/Portable	1	YAMATO	2001	1.500.000,00
191	Alat Pemadam/Portable	1	APRON	2001	1.500.000,00
192	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	KAYU KACA	2000	750.000,00
193	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	KAYU KACA	2009	1.500.000,00
194	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	KAYU KACA	2009	3.500.000,00
195	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	KAYU	2000	500.000,00
196	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	KAYU	2002	500.000,00
197	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	KAYU	2002	750.000,00
198	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	KAYU	2002	750.000,00
199	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	KAYU	2003	750.000,00
200	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	KAYU	2007	3.000.000,00
201	Meja Tamu Biasa	1	KAYU	2020-12-10	5.580.000,00
202	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		2020-12-10	1.000.000,00
203	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	KAYU	2009	500.000,00
204	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	BESI	2020-12-10	754.000,00
205	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	BESI	2020-12-10	1.800.000,00
206	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5		2022-12-07	4.961.700,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
207	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	KAYU	2007	1.000.000,00
208	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BESI	2009	500.000,00
209	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5	7301 B FAR	2022-04-11	4.635.000,00
210	Professional Sound System	1	SOUNDSYSTEM	2015-05-15	27.709.000,00
211	Receiver HF/LF	1	Receiver	2012	20.350.000,00
212	Camera Electronic	1	Kamera DSLR	2016-12-13	6.292.000,00
213	Camera Digital	1	CANON	2015-03-16	9.922.000,00
214	LCD Monitor	1	EPSON	2013-11-07	1.865.000,00
215	Mesin Potong	1	Mesin Potong	2020-04-20	1.655.280,00
216	Tripod	1	Tripod Camera	2016-12-13	968.000,00
217	Handy Cam	1	SONY	2015-03-16	12.947.000,00
218	Unit Tranceiver VHF Portable	1	Radio VHF (Rig)	2012	2.398.000,00
219	Tabung O2	3	Tabung oksigen	2010	7.915.200,00
220	Tabung O2	4	Tabung Oxygen	2013-12-17	9.240.000,00
221	Tabung O2	2	Tabung Oxygen	2013-12-17	2.970.000,00
222	Tabung O2	2	Tabung Oxygen	2013-10-29	4.620.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
223	Tabung O2	2	Tabung Oxygen 6m3	2018-06- 06	4.719.000,00
224	Tabung O2	2	Tabung Oxygen 6m3	2018-08- 20	4.840.000,00
225	Timbangan Elektronik	2	Timbangan Digital	2018-06- 06	1.694.000,00
226	Timbangan Elektronik	2	Timbangan Digital	2018-08- 07	1.694.000,00
227	Alat Pengukur Kadar Air	1	totn	2008	1.732.500,00
228	Do Meter	2	Bak Fiberglass Penetasan	2007	9.000.000,00
229	Do Meter	1	DO Meter	2008	9.768.000,00
230	Secchi Disk	1	seinch	2008	1.465.200,00
231	Spectrophotometer	1	spectrometer stan	2008	47.410.000,00
232	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	Autoclave 8-20 ltr	2008	10.683.750,00
233	Bak Fiberglass	2	Bak Fiberglass	2008	2.970.000,00
234	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Refractometer	2008	1.933.250,00
235	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Refractometer	2019-11- 20	4.658.500,00
236	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Refractometer	2019-11- 20	4.658.500,00
237	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	Binocular Microscope	2008	86.773.500,00
238	Analytical Balance Electric	1	Analytical balance	2008	17.094.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
239	Balance Gram	2	Hapa	2007	1.400.000,00
240	Mesin Blowing	1	Mesin blower	2008	2.019.600,00
241	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	DO Meter	2015-03-20	5.445.000,00
242	PH Meter Digital	1	PH Meter air	2008	5.665.000,00
243	PH Meter Digital	12	PH Meter	2013-08-05	17.424.000,00
244	PH Meter Portable	3	Ph meter Standat	2018-08-07	4.628.250,00
245	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)	6	akuarium besar	2008	3.564.000,00
246	Tabung Reaksi	2	Tabung Oksigen	2008	4.415.895,00
247	Pipa Plastik	1	HDPE HDPE 2,5 PN 16	2024-03-22	47.950.000,00
248	Pipa Plastik	1		2024-05-13	47.950.000,00
249	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1		2024-10-22	5.944.000,00
250	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1	Teropong Binocular	2013-08-26	3.388.000,00
251	Alat Khusus Bahari	1	Alat Selam	2015-10-28	39.591.000,00
252	Alat Khusus Bahari	1	Alat Selam	2016-05-30	28.979.000,00
253	P.C Unit	1	PC/infitri	2017-10-12	6.700.000,00
254	Lap Top	1	Toshiba	2007	12.923.200,00
255	Lap Top	2	Toshiba	2008	21.450.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
256	Lap Top	1	asus	2013-03-27	6.270.000,00
257	Lap Top	1	asus	2013-06-27	7.228.900,00
258	Lap Top	1	asus	2013-11-18	8.222.500,00
259	Lap Top	1	HP	2014-03-27	7.997.000,00
260	Lap Top	1	DeLL	2014-10-27	7.975.000,00
261	Lap Top	1	Laptop Toshiba 14 D 108	2014-11-27	7.997.000,00
262	Lap Top	1	Lenovo	2014-11-24	6.198.500,00
263	Lap Top	1	asus	2015-03-17	8.468.900,00
264	Lap Top	1	Asus	2017-11-30	7.920.000,00
265	Lap Top	2	note BOOK/laptop	2018-12-18	19.101.200,00
266	Lap Top	1	laptop L komputer Notebox	2019-07-20	13.083.800,00
267	Lap Top	1	Laptop	2019-12-11	9.823.200,00
268	Lap Top	2	Hp 14S-CF2517	2022-06-14	18.870.000,00
269	Lap Top	2	Acer Travelmate P214 I5- 1135G7	2024-02-29	23.950.000,00
270	Lap Top	2	Acer P214 I5 1135G7	2024-03-04	24.620.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
271	Lap Top	2	Asus P1412CEA_ID- EK5850X	2024-04- 19	29.450.000,00
272	Note Book	1	Toshiba	2011	9.950.000,00
273	Note Book	1	Toshiba	2011	10.164.000,00
274	CPU (Peralatan Mainframe)	1	LG	2013-11- 06	5.940.000,00
275	Hard Disk	1	ADATA	2016-12- 13	1.694.000,00
276	Hard Disk	2	Hardisk Ekternal	2019-12- 23	2.000.000,00
277	Monitor	1	LG 24P60GM	2024-03- 04	2.850.000,00
278	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson L110	2013-12- 13	1.930.500,00
279	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Printer Epson L300	2014-10- 23	3.496.900,00
280	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON L120	2015-11- 30	2.050.000,00
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Zebra ZXP	2016-12- 13	14.701.500,00
282	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON	2016-12- 13	2.662.000,00
283	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		2017-11- 30	2.695.000,00
284	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Epson L565 Wifi All-in	2018-12- 18	8.949.600,00



No	Nama Barang	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga
285	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Printer Epson L6170	2019-12-11	5.412.000,00
286	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Printer Epson L6170	2019-12-11	5.412.000,00
287	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson L 310	2022-04-04	3.225.000,00
288	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson L3250	2024-03-04	3.850.000,00
289	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Epson L3210	2024-03-04	8.550.000,00
290	External/ Portable Hardisk	1		2022-09-15	930.000,00
291	External/ Portable Hardisk	1		2024-04-10	1.390.000,00
292	Router	1	Mikrotik	2023-12-19	2.930.000,00
293	U- Tube Shell Tube HE	1	Shell and tube	2012	82.500.000,00
Total					4.187.149.960,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel KIB B Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tercatat 293 item dengan kondisi yang beragam mulai dari kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat dengan nilai total sebesar Rp. 4.187.149.960



**Tabel 2.7 KIB C (Gedung dan Bangunan) Sarana dan Prasarana Dinas
Perikanan Kabupaten Pacitan**

No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	200	Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku	1998	18.400.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	100	Kel. Sidoharjo Kec/Kab Pacitan	2003	120.000.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	352,5	Tamperan Kel Sidoharjp Kec/Kab Pacitan	2007	319.753.000,00
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	500	Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung	1990	150.000.000,00
5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	65	Desa Katipugal, Kec. Kebonagung	2011	98.604.651,00
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			2011	87.818.651,00
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			2011	117.561.269,00
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	143	Desa Pager Kidul, Kec. Sudimoro	2011	251.200.000,00
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	86	Teleng, Kel Sidoharjo, Kecamatan Pacitan	2010	135.289.485,00
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	81	Ds Kembang Kec Pacitan	2009	131.143.000,00
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	50	Desa wora-wari Kecamatan Kebonagung	2010	97.361.808,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
16	Bangunan Gudang Tertutup Permanen		Desa Klesem Kec Kebonagung	2009	72.250.570,80
17	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	41	Ds. Karangnongko Kec Kebonagung	2009	59.843.557,19
18	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	63	Ds. Katipugal Kec Kebonagung	2009	89.923.264,78
19	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	525	Kel. Sidoharjo, Kab Pacitan	2007	121.199.000,00
20	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	87	Teleng Ria Kec Pacitan	2010	177.100.856,00
21	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	695	Ds Kembang Kec Pacitan	2010	64.625.144,00
22	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	28	Ds. Ngadirojo Kec. Ngadirojo	2012	101.604.000,00
23	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	28	Ds. Klesem Kec. Kebonagung	2012	71.470.300,00
25	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Pacitan	2012	90.579.000,00
26	Bangunan Pembesar Ikan	100	BBI Jati Gunung Kec Tulakan	2011	35.957.075,00
27	Bangunan Pembesar Ikan	250	BBI Jati Gunung Kec Tulakan	2011	71.174.814,00
28	Bangunan Pembesar Ikan	500	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	2011	101.856.000,00
29	Bangunan Pembesar Ikan	100	BBI Jati Gunung Kec Tulakan	2009	165.902.000,00
30	Flat/Rumah Susun Permanen	58	Tamperan, Kel. Sidoharjo, Kab Pacitan	2007	96.650.000,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
31	Rambu Suar	36	Tamperan Kel Sidoharjp Kec/Kab Pacitan	2007	92.150.000,00
32	Rambu Suar	16	Kecamatan Sudimoro	2009	89.494.000,00
33	Rambu Suar	16	Ds. Karangnaongko Kec. Kebonagung	2012	98.800.000,00
34	Pagar Permanen	59		2012	92.270.000,00
35	Bangunan Gedung Kantor Permanen			1970	300.503.750,00
37	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	90	Desa Sukorejo Kec sudimoro	2008	88.691.000,00
38	Bangunan Gudang Terbuka Permanen			2008	88.691.000,00
39	Bangunan Gudang Terbuka Permanen			2008	88.691.000,00
40	Bangunan Pabrik Es	162	Kel. Sidoharjo, Kab Pacitan	2012	810.592.000,00
41	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	92		2013	110.786.431,00
42	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	45	Ds Kebonagung, Kec. Kebonagung	2013	88.903.000,00
43	Bangunan Lantai Jemur Permanen	400	Teleng, Kel Sidoharjo, Kec. Pacitan	2013	51.250.000,00
44	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Ds. Ngadirojo Kec. Ngadirojo	2013	97.575.748,00
45	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan	2013	36.798.000,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
46	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Ds. Cokrokembang Kec. Ngadirojo	2013	97.794.620,18
47	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Ds.Hadiwarno, Kec. Ngadirojo	2013	97.835.879,22
48	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Desa Hardiwarno, Kec Ngadirojo	2013	46.038.000,00
49	Pagar Semi Permanen			2013	31.700.000,00
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Ds. Hadiwarno, Kec Ngadirojo	2014	102.909.509,00
51	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	50	Desa Worawari Kec Kebonagung	2014	125.100.000,00
52	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	89	Desa Sidomulyo Kec Ngadirojo	2014	125.100.000,00
53	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	95	TPI Wawaran Ds Sidomulyo Kec Kebonagung	2014	125.120.000,00
54	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	24	Pembangunan Gedung TPI Desa Klesem Kec Kebonagung	2014	253.912.369,00
55	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	32	Desa Klesem Kec Kebonagung	2014	88.940.000,00
56	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	56	TPI Ds Pumbungan Kec Kebonagung	2014	125.174.000,00
57	Gedung Pos Jaga Permanen	36	Desa Hadiwarno Kec Ngadirojo	2014	103.146.387,00
58	Gedung Pos Jaga Permanen	41	Desa Hadiwarno Kec Ngadirojo	2014	53.585.104,00
59	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kolam Sekolah Kel.	2014	36.262.000,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
			Sidoarjo Kec Pacitan		
60	Bangunan Kolam/Bak Ikan			2014	120.575.750,00
61	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Ds Worawari Kec Kebonagung	2014	73.585.000,00
62	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	99		2014	98.420.000,00
63	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	117		2015	114.844.646,00
64	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen			2015	120.435.354,00
65	Gedung Pos Jaga Permanen	40	Desa Sidomulyo Kec Ngadirojo	2015	110.711.791,00
66	Gedung Pos Jaga Permanen	24	Desa Sirnoboyo Kec Pacitan	2015	42.550.000,00
67	Bangunan Untuk Kandang			2015	15.903.000,00
68	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI Kucur, Kel Sidoarjo, Kec. Pacitan	2015	197.850.000,00
69	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten			2015	99.312.000,00
70	Pagar Permanen	321		2015	97.940.000,00
71	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	99	wawaran desa sidomulyo kecamatan kebonagung	2016	150.560.000,00
72	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung	2016	47.838.000,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
73	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI Jatigunung Ds Jatigunung Kec Tulakan	2016	17.973.000,00
74	Pagar Permanen	1053	Kelurahan Sidiharjo, Kec Pacitan	2016	131.272.700,00
75	Pagar Permanen	17	Desa Karangnongko, Kec Kebonagung	2016	52.231.000,00
76	Pagar Permanen	2000		2016	55.236.000,00
77	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	56	Kelurahan Sidiharjo, Kec Pacitan	2017	207.725.000,00
78	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	56	Desa Klesem Kec Kebonagung	2017	144.734.000,00
79	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	56	Desa Karangnongko, Kec Kebonagung	2017	144.077.000,00
80	Gedung Pos Jaga Permanen	42	Desa Sendang Kec Donorojo	2017	89.299.000,00
81	Gedung Pos Jaga Permanen	42	Desa Sendang Kec Donorojo	2017	89.199.000,00
82	Gedung Pos Jaga Permanen	42	Desa Sendang Kec Donorojo	2017	89.210.000,00
83	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Kontruksi Pembangunan Kolam UPR	2017	108.670.000,00
84	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Kontruksi Pembangunan Kolam Sekolah	2017	38.351.800,00
85	Bangunan Kolam/Bak Ikan			2017	51.820.000,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
86	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Teleng Sidoharjo kec. Pacitan	2017	273.030.558,00
87	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Desa Jatigunung Kec Tulakan	2017	210.467.000,00
88	Bangunan Kolam/Bak Ikan		PEMBANGUNAN KOLAM TAMBAK	2017	93.037.000,00
89	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	60	Tamperan Kel Sidoharjp Kec/Kab Pacitan	2018	194.474.000,00
90	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI Jatigunung , Desa Jatigunung Kec Tulakan	2018	172.466.271,00
91	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI KUCUR Sidoharjo Kel Sidoarjo Kec Pacitan	2018	59.737.841,00
92	Bangunan Kolam/Bak Ikan		MAN Pacitan Kel Ploso Kec Pacitan	2018	25.964.046,00
93	Bangunan Kolam/Bak Ikan		SD Ploso 2 Kec. Pacitan Kel Ploso Kec Pacitan	2018	25.780.208,00
94	Bangunan Kolam/Bak Ikan		SDIT Tawakal Kec. Ngadirojo	2018	25.872.792,00
95	Bangunan Kolam/Bak Ikan		SLB YKK Kec Pacitan	2018	25.962.987,00
96	Bangunan Kolam/Bak Ikan		SDN Bolosingo Ds Bolosingo Kec Pacitan	2018	25.962.967,00
97	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI Jatigunung , Desa Jatigunung Kec Tulakan	2018	157.525.950,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
98	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI KUCUR Kel Sidoharjo Kec Pacitan	2018	172.878.438,00
99	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI JATIGUNUNG Ds Jatigunung Kec Tulakan	2018	74.827.500,00
100	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI KUCUR Sidoharjo Kel Sidoarjo Kec Pacitan	2018	74.827.500,00
101	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Ds. Tanjungsari Kec. Pacitan	2018	41.486.372,00
102	Pagar Permanen	60		2018	181.753.775,00
103	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI Jatigunung , Desa Jatigunung Kec Tulakan	2019	40.777.115,00
104	Bangunan Kolam/Bak Ikan		BBI KUCUR Kel Sidoharjo Kec Pacitan	2019	40.567.437,00
105	Bangunan Kolam/Bak Ikan		Pantai Taman Ds Hadiwarno	2019	144.813.000,00
106	Pagar Permanen	50		2019	144.633.000,00
107	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2021	163.075.000,00
108	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2021	169.376.000,00
109	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			2021	118.329.687,00
110	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			2021	163.983.093,75
111	Bangunan Gedung Kantor Permanen	54		2022	149.662.100,00



No	Nama Barang	Luas	Alamat (lokasi)	Tahun Pembangunan	Harga
112	Pagar Permanen	191,1		2022	103.184.500,00
113	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2024	45.690.750,00
114	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2024	99.178.650,00
115	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen			2024	43.205.000,00
116	Pagar Permanen			2024	26.000.000,00
117	Pagar Permanen			2024	72.000.000,00
118	Pagar Permanen			2024	24.535.000,00
119	Bangunan Gedung Kantor Permanen	35m2	Jl. Dr Soetomo No.41 Pacitan	2025	71.476.000,00
Total					12.361.946.821,92

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel KIB C Gedung dan Bangunan Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tercatat 119 gedung dan bangunan yang didirikan di tanah negara dan tanah lembaga dengan nilai total sebesar Rp. 12.361.946.821,92

Tabel 2.8 KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
1	Bangunan penguat tebing/pantai	1	2009	299.200.000,00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
2	Bangunan penguat tebing/pantai	1	2009	248.655.000,00
3	Dermaga	1	2011	329.485.429,00
4	Dermaga	1	2011	327.476.429,00
5	Dermaga	1	2011	327.115.429,00
6	Dermaga	1	2010	325.624.912,00
7	Dermaga	1	2010	325.157.470,00
8	Instalasi listrik kantor	1	2009	47.450.000,00
9	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	2009	3.475.000,00
10	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	2010	54.363.312,00
11	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	2010	83.726.707,00
12	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	2010	65.260.685,00
13	Jalan kabupaten lokal	1	2012	194,109,000.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
14	Jalan kabupaten lokal	1	2012	101,239,000.00
15	Jalan kabupaten lokal	1	2012	101,976,000.00
16	Jalan kabupaten lokal	1	2012	100,618,000.00
17	Saluran pembawa air baku tertutup	1	2012	129,079,000.00
18	Dermaga	1	2012	322,313,000.00
19	Dermaga	1	2012	439,228,000.00
20	Instalasi listrik PJU	1	2012	78,512,000.00
21	Instalasi listrik PJU	1	2012	33,678,000.00
22	Saluran pembawa air baku tertutup	1	2012	45,547,587.00
23	Jalan desa	1	2012	98,673,747.00
24	Saluran pembawa air baku tertutup	1	2012	83,059,666.00
25	Jalan kabupaten lokal	1	19/08/13	97,000,000.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
26	Jalan kabupaten lokal	1	20/05/13	96,448,000.00
27	Jalan kabupaten lokal	1	20/05/13	97,050,000.00
28	Jalan kabupaten lokal	1	29/07/13	298,898,000.00
29	Krib pengaman sungai/pantai	1	20/05/13	112,950,000.00
30	Dermaga	1	20/05/13	180,500,000.00
31	Krib pengaman sungai/pantai	1	20/05/13	179,643,000.00
32	Dermaga	1	29/07/13	423,920,000.00
33	Instalasi listrik PJU	1	20/05/13	90,476,000.00
34	Instalasi listrik PJU	1	20/05/13	90,489,000.00
35	Instalasi listrik PJU	1	20/05/13	57,140,000.00
36	Jalan kabupaten lokal	1	10/06/13	97,740,000.00
37	Jalan kabupaten lokal	1	10/06/13	146,437,000.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
38	Jalan kabupaten lokal	1	19/08/13	283,991,500.00
39	Jalan kabupaten lokal	1	10/06/13	146,950,000.00
40	Jalan kabupaten lokal	1	10/06/13	97,466,000.00
41	Talud	1	10/06/13	146,775,976.00
42	Talud	1	10/06/13	97,179,000.00
43	Jalan kabupaten lokal	1	19/08/13	146,875,000.00
44	Jalan kabupaten lokal	1	08/07/13	97,665,000.00
45	Jalan kabupaten lokal	1	27/05/13	97,682,500.00
46	Jalan kabupaten lokal	1	27/05/13	87,270,163.65
47	Jalan kabupaten lokal	1	27/05/13	76,752,408.86
48	Jalan kabupaten lokal	1	27/05/13	97,634,428.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
49	Saluran pembawa air baku tertutup	1	27/05/13	86,621,228.20
50	Saluran pembawa air baku tertutup	1	27/05/13	86,552,206.48
51	Jalan kabupaten lokal	1	10/06/13	97,667,580.05
52	Saluran pembawa air baku tertutup	1	27/05/13	62,222,565.33
53	Jalan kabupaten lokal	1	10/06/13	97,667,580.00
54	Jalan kabupaten lokal	1	19/08/13	97,412,839.45
55	Jalan kabupaten lokal	1	20/06/13	97,780,000.00
56	Instalasi listrik PJU	1	2012	22,000,000.00
57	Instalasi listrik PJU	1	2012	133,595,000.00
58	Instalasi listrik PJU	1	26/06/14	131,577,000.00
59	Jalan desa	1	23/07/14	159,740,000.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
60	Saluran drainage	1	23/05/14	78,697,000.00
61	Jalan desa	1	24/06/14	170,455,000.00
62	Talud	1	23/05/14	114,341,200.00
63	Jalan desa	1	23/07/14	196,500,000.00
64	Jalan desa	1	09/12/14	196,188,000.00
65	Jalan desa	1	20/11/14	196,864,000.00
66	Jalan desa	1	25/11/14	98,150,000.00
67	Jalan desa	1	13/11/14	92,500,000.00
68	Dermaga	1	09/09/14	196,751,000.00
69	Jalan desa	1	09/06/14	97,596,678.00
70	Jalan desa	1	19/05/14	92,562,316.00
71	Saluran pembawa air baku tertutup	1	23/07/14	66,872,873.00
72	Jalan desa	1	26/06/14	86,330,816.00
73	Saluran pembawa air baku tertutup	1	23/07/14	66,892,410.00
74	Saluran pembawa air baku tertutup	1	23/06/14	82,132,717.00
75	Jalan desa	1	20/10/14	98,035,274.00
76	Jalan desa	1	05/11/14	142,054,177.00
77	Jalan desa	1	04/11/14	98,180,315.00
78	Jalan desa	1	13/11/14	98,306,706.00
79	Jalan desa	1	03/11/14	98,301,528.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
80	Saluran pembawa air baku tertutup	1	18/07/14	73,585,000.00
81	Saluran pembawa air baku tertutup	1	24/10/14	98,092,109.00
82	Saluran pembawa air baku tertutup	1	09/10/14	98,263,047.00
83	Jalan desa	1	18/07/14	73,568,219.00
84	Saluran pembawa air baku tertutup	1	20/10/14	98,170,844.00
85	Jalan desa	1	22/07/14	98,177,306.00
86	Jalan desa	1	23/07/14	98,147,257.00
87	Jalan desa	1	18/07/14	73,568,218.00
88	Jalan desa	1	11/11/14	73,497,000.00
89	Jalan desa	1	22/06/15	151,231,884.00
90	Jalan desa	1	30/07/15	198,217,238.00
91	Jalan desa	1	13/07/15	126,157,910.00
92	Jalan desa	1	29/06/15	150,650,786.00
93	Jalan desa	1	21/05/15	103,289,182.00
94	Talud	1	03/07/15	284,707,552.00
95	Instalasi listrik PJU	1	29/06/15	139,519,000.00
96	Talud	1	12/06/15	98,528,948.00
97	Jalan desa	1	29/06/15	53,527,000.00
98	Jalan desa	1	29/06/15	88,254,103.00
99	Jalan desa	1	22/06/15	88,338,722.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
100	Jalan desa	1	02/07/15	88,279,175.00
101	Saluran pembawa air baku tertutup	1	30/06/15	79,903,771.00
102	Saluran pembawa air baku tertutup	1	07/07/15	80,196,229.00
103	Saluran pembawa air baku tertutup	1	06/11/15	251,874,000.00
104	Saluran pembawa air baku tertutup	1	18/12/15	24,905,000.00
105	Jalan desa	1	24/10/16	124,793,000.00
106	Instalasi listrik PJU	1	01/07/16	129,792,000.00
107	Talud	1	19/08/16	124,489,000.00
108	Jalan desa	1	13/07/16	104,516,000.00
109	Jalan desa	1	13/07/16	140,390,000.00
110	Dermaga	1	01/08/17	165,818,000.00
111	Saluran pembawa air baku tertutup	1	22/07/16	186,660,000.00
112	Saluran pembawa air baku tertutup	1	18/08/17	376,317,735.00
113	Jalan desa	1	02/07/18	204,849,500.00
114	Jalan desa	1	11/12/18	194,940,029.00
115	Jalan desa	1	11/12/18	133,420,254.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
116	Jalan desa	1	11/12/18	194,965,717.00
117	Talud	1	18/12/18	194,700,000.00
118	Dermaga	1	11/12/18	194,600,000.00
119	Jalan kabupaten lokal	1	13/03/19	101,911,500.00
120	Saluran pembuang	1	13/08/19	56,049,413.00
121	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	13/08/19	87,953,800.00
122	Saluran tersier pembuang (bangunan pembuang irigasi)	1	29/08/19	110,413,500.00
123	Saluran muka (bangunan pembawa pasang surut)	1	2010	126,458,536.00
124	Saluran muka (bangunan pembawa pasang surut)	1	2010	92,664,736.00
125	Saluran muka (bangunan pembawa pasang surut)	1	2010	105,385,545.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
126	Saluran muka (bangunan pembawa pasang surut)	1	2010	301,098,615.00
127	Saluran drainage	1	2011	98,362,000.00
128	Saluran muka (bangunan pembawa pasang surut)	1	2011	166,408,714.00
129	Jembatan pada jalan kabupaten lokal	1	2011	224,006,558.00
130	Jalan desa	1	2010	80,244,000.00
131	Jalan kabupaten lokal	1	2011	330,498,837.00
132	Jalan kabupaten lokal	1	09/09/19	137,057,076.00
133	Jalan kabupaten lokal	1	09/09/19	39,703,724.00
134	Sumur dengan pompa (bangunan pengambilan irigasi)	1	24/04/18	19,900,000.00



No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
135	Talud	1	15/06/21	77,000,000.00
136	Instalasi listrik kantor	1	10/03/21	1,320,000.00
137	Talud	1	19/08/13	97,823,000.00
138	Saluran pembawa air baku tertutup	1	06/06/13	97,733,116.13
139	Saluran pembawa air baku tertutup	1	10/06/13	97,480,383.87
140	Jembatan pada jalan kabupaten lokal	1	2012	7,902,000.00
141	Instalasi listrik PJU	1	2012	78,435,000.00
142	Jalan desa	1	23/05/14	97,037,190.00
143	Saluran pembawa air baku tertutup	1	21/06/18	161.439.000,00
144	Saluran muka (bangunan pembawa pasang surut)	1	19/04/24	34.002.000,00
Total				19.041.693.338

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tercatat 144 unit dengan nilai total sebesar Rp. 19.041.693.338



Tabel 2.9 KIB E (Aset Tetap Lainnya) Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

No	Nama Barang	Jenis	Tahun Pembelian	Harga
1	Arca/patung	Patung	01/08/17	168,923,000
Total				168.923.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Pada tabel KIB E Aset Tetap Lainnya Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tercatat 1 patung penyu yang dibangun di lokasi konservasi penyu Pantai Taman Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo dengan nilai total sebesar Rp. 168.923.000

Berdasarkan tabel di atas, sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tercatat dari KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, dan KIB E yang mana termasuk dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan sudah cukup memadai. Meski begitu, tetap diperlukan pemeliharaan secara berkala dan juga perlu dilakukan peremajaan seperti pengadaan aset baru sehingga dapat menunjang kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menjadi tetap optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang terkait, dengan dukungan pendanaan, melalui program dan kegiatan yang tersedia. Adapun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan



No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Perikanan (ton)			V	13.431,79	13.916,88	13.596,00	14.050,00	14.519,00	13.891,53	14.808,55	10.521,53	14.393,01	12.529,97	103%	106%	77%	102%	86%
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan			V	12.258,39	12.626,14	11.330	11.670	12.020	11.733,07	12.643,68	8.874,35	12.940,45	11.091,14	96%	100%	78%	111%	92%
	Produksi Perikanan Budidaya (Kolam, Keramba, Minapadi, Tambak)			V	1.173,40	1.290,74	2.266	2.380	2.499	2.158,46	2.164,87	1.647,18	1.452,56	1.438,83	184%	168%	73%	61%	58%
2	Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan			V	1.699,62	1.784,60	1.493	1.523	1.554	1.017,92	1.059,71	1.123,97	1.688,37	1.721,97	60%	59%	75%	111%	111%



No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Cakupan Masyarakat Perikanan yang Mandiri			V	5.486	5.761	N/A	N/A	N/A	5.315	5.415	N/A	N/A	N/A	97%	94%	N/A	N/A	N/A
4	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Thn)			V	19,76%	21%	N/A	N/A	N/A	32,83%	33%	N/A	N/A	N/A	166%	157%	N/A	N/A	N/A
5	Peningkatan Produksi Benih Ikan (ekor)			V	2.166.868	2.383.555	N/A	N/A	N/A	1.766.484	5.500.000	N/A	N/A	N/A	82%	231%	N/A	N/A	N/A
6	Prosentase Kelompok			V	77	N/A	N/A	N/A	N/A	75,98	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	N/A	N/A	N/A	N/A



No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Perikanan yang Berdaya (%)																		
7	Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan			V	N/A	N/A	N/A	31,7	33,18	N/A	N/A	N/A	32,53	32,53	N/A	N/A	N/A	103%	98%

Sumber : LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 tahun, untuk indikator kinerja produksi perikanan kelompok nelayan menunjukkan capaian yang fluktuatif. Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2020 tidak mencapai target dengan produksi sebesar 11.733,07 ton dari target 12.258,39 ton, pada tahun 2021 capaian produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 12.643,68 ton melebihi target produksi sebesar 11.000 ton sedangkan capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang drastis, hanya sebesar 8.874,35 ton dari target 11.330 ton. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan produksi sehingga mampu melampaui target dengan produksi sebesar 12.940,45 ton dari target 11.670 ton. Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali dari target 12.020 ton dengan capaian sebesar 11.091,14 ton.

Indikator Produksi Perikanan Budidaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir realisasinya cenderung stagnan tetapi mengalami penurunan dari target. Pada tahun 2020 dan 2021 produksi perikanan budidaya melebihi target dengan capaian sebesar 2.158,46 ton (tahun 2020) dan 2.164,87 ton (tahun 2021) dari target 1.172,40 ton di tahun 2020 dan target 2.153 ton di tahun 2021. Capaian produksi pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan di setiap tahunnya, pada tahun 2022 produksi turun drastis sebesar 1.647,18 ton dari target 2.266 ton, pada tahun pada tahun 2023 produksi turun kembali sebesar 1.452,56 ton dari target 2.380 ton dan pada tahun 2024 produksi juga mengalami penurunan sebesar 1.438,83 ton dari target 2.499 ton.

Indikator Kinerja Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir realisasinya cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami kenaikan produksi meskipun tidak mencapai target sesuai pada tabel 2.4. Pada tahun 2023 produksi produk olahan hasil perikanan melebihi target dengan capaian



sebesar 1.688,37 ton dari target 1.523 ton dan pada tahun 2024 capaian produksi juga melebihi target dengan capaian 1.721,97 ton dari target 1.554 ton.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Uraian (1)	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2020 (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)	2020 (12)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)	2024 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp1.280.020.000	Rp805.110.010	N/A	N/A	N/A	Rp1.269.471.050	Rp803.206.850	N/A	N/A	N/A	99%	100%	N/A	N/A	N/A	-	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp1.785.950.000	Rp1.697.732.000	N/A	N/A	N/A	Rp1.780.641.000	Rp16.839.920.000	N/A	N/A	N/A	100%	99,2%	N/A	N/A	N/A	-	-
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Rp169.559.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp163.048.000	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan	291.564.200	Rp971.295.040	N/A	N/A	N/A	288.028.600	Rp967.278.545	N/A	N/A	N/A	98\%	100%	N/A	N/A	N/A	-	-
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	N/A	N/A	Rp591.670.000	Rp155.000.000	Rp589.802.000	N/A	N/A	Rp587.299.889	Rp154.079.900	Rp588.981.100	N/A	N/A	99%	99%	100%	-	-



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	N/A	N/A	Rp710.465.000	Rp225.000.000	Rp1.057.494.500	N/A	N/A	Rp706.329.260	Rp222.347.500	Rp1.045.605.683	N/A	N/A	99,4%	98,8%	98,9%	-	-
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	N/A	N/A	Rp686.895.000	Rp319.000.000	Rp1.633.914.000	N/A	N/A	Rp684.379.529	Rp317.006.232	Rp1.623.687.130	N/A	N/A	99,6%	99,4%	99,4%	-	-

Sumber : LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan



Berdasarkan data capaian anggaran, sebagian besar program di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menunjukkan stabilitas dalam rasio realisasi anggaran dari tahun ke tahun, yang mencerminkan pengelolaan pendanaan yang cukup baik. Pada 2020–2021, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berhasil direalisasikan hampir 100%, bahkan pada 2021 realisasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap mencapai 99,2%. Mulai tahun 2022, kedua program tersebut berubah nomenklatur menjadi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang tetap menunjukkan kinerja serapan anggaran tinggi di kisaran 98,8–99,6% hingga 2024. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan yang hanya dilaksanakan pada 2020 mencatat realisasi sebesar 96%, kemudian pada 2021 dilanjutkan sebagai Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan dengan capaian 100%. Sejak 2022, program ini berubah menjadi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang mempertahankan kinerja serapan anggaran sangat baik di kisaran 99–100% hingga 2024. Secara keseluruhan, pengelolaan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tetap menunjukkan upaya perbaikan yang berkelanjutan dan pengelolaan anggaran yang cukup baik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:



Tabel 2.12 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Perikanan Tangkap	Bimtek Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Bimtek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Sosialisasi Regulasi Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Pelatihan Teknis Usaha Garam Rakyat	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Iuran Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian untuk Nelayan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Fasilitasi Kegiatan HNSI	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
		Penyusunan Buku Profil Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Perbaikan Fasilitas Darat di Tempat Pendaratan Ikan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		Restocking Ikan di Perairan Umum	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
		Penerbitan perijinan atau rekomendasi untuk pemenuhan usaha perikanan tangkap	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
2	Bidang Perikanan Budidaya	Bantuan Penguatan Kelompok Budidaya Lele	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Bantuan Penguatan Kelompok Budidaya Nila	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Bantuan Pendampingan Kelompok Peti Koin Bermantra	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Bimtek Budidaya Lele dan Nila	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Bimtek Budidaya Udang	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Bantuan Kelompok Sarpras Budidaya Nila	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Bantuan sarpras pembenihan untuk UPR	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
		Sarpras BBI	Balai Benih Ikan (BBI)



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		Pengadaan Calon Induk Nila Unggul dan Benur Udang Vaname	Balai Benih Ikan (BBI)
		Pengadaan Kolam Terpal Bundar	Balai Benih Ikan (BBI)
		Pengadaan Pakan BBI (pakan ikan dan pakan udang)	Balai Benih Ikan (BBI)
		Belanja Alat Listrik BBI	Balai Benih Ikan (BBI)
		Pemeliharaan Bangunan dan Kolam BBI Jatigunung	Balai Benih Ikan (BBI)
		Pemeliharaan Bangunan dan Kolam BBI Kucur	Balai Benih Ikan (BBI)
		Belanja Obat Ikan	Lab Kesehatan Ikan
		Belanja Bahan Kimia	Lab Kesehatan Ikan
		Pemdampingan perijinan dan rekomendasi untuk pemenuhan usaha perikanan budidaya	Pelaku usaha perikanan budidaya
3	Bidang Pengelolaan Produk Perikanan	Bimtek Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Gemarikan	Ibu hamil dan menyusui, balita



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
			stunting serta anak usia sekolah
		Bimtek Wanita Berdaya Usaha Pengolahan Ikan (WANI ASAH IKAN)	Ibu-ibu anggota PKK Desa dan istri pelaku usaha perikanan
		Temu Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Lomba Masak Ikan Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan
		Pendampingan perijinan usaha pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Uji Laboratorium produk olahan hasil perikanan	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Pemdampingan perijinan dan rekomendasi untuk pemenuhan usaha pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten



Pacitan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.13 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Bappedalitbang	Pelaku Usaha Perikanan	Perencanaan, Pengkajian, dan pelaksanaan kegiatan sektor perikanan
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha Perikanan	Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kegiatan sektor perikanan



No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
3	Diskominfo	Pelaku Usaha Perikanan	Pengelolaan data dan informasi kegiatan sektor perikanan
4	DPMPTSP dan Dinas Kesehatan	Pelaku Usaha Perikanan	Fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk olahan perikanan
	Kemenag (BPJPH)	Pelaku Usaha Perikanan	Sertifikasi produk olahan perikanan
5	Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS Ketenagakerjaan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6	Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
7	KAMLADU, BPBD, Basarnas	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Penanganan Laka Laut
8	BPBD	Nelayan dan Masyarakat Pesisir	Mitigasi Bencana
9	Satpol PP	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Penegakan perda retribusi dan perlindungan hewan dilindungi
10	Dukcapil	Pelaku Usaha Perikanan	Verifikasi identitas pelaku usaha perikanan
11	Lembaga Keuangan	Pelaku Usaha Perikanan	Permodalan usaha pada pelaku usaha perikanan
12	ATR/BPN	Pelaku Usaha Perikanan	Program Sertifikasi Hak Atas Tanah



No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
		Tangkap dan Budidaya	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Mitra-mitra perangkat daerah yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Kolaborasi antara Dinas Perikanan dengan mitra-mitra tersebut, seperti Bappedalitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Kemenag (BPJPH), RSUD, BPJS Ketenagakerjaan, Satpol PP, Dinas Dukcapil, ATR/BPN dan Lembaga Keuangan menciptakan sinergi yang mendukung pencapaian tujuan pengembangan sektor perikanan, mulai dari pendampingan usaha budidaya, fasilitasi perijinan, hingga pemberian layanan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pelaku usaha perikanan. Mitra lainnya, seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, memberikan dukungan dalam pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, sementara lembaga-lembaga lain, seperti KAMLADU, BPBD, dan Basarnas, berperan dalam penanganan kecelakaan laut. Melalui sinergi ini, diharapkan seluruh layanan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha perikanan, serta mendorong keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Pacitan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
1.	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya	Rendahnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya	Keterbatasan anggaran, fasilitas bantuan dan permodalan	Keterbatasan aspek permodalan, SDM, SDA dan jaringan teknologi
		Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya	Keterbatasan anggaran penyediaan sarana dan prasarana	Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pembudidaya
		Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul (bersertifikat)	Belum optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI)	1. Belum optimalnya pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 2. Terbatasnya induk yang bersertifikat
		Ketidakstabilan harga jual dan keterbatasan pasar	Terbatasnya jaringan pemasaran dan jumlah pasar ikan	1. Ketersediaan produk budidaya yang tidak kontinyu 2. Kualitas produk perikanan budidaya yang belum stabil



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
		Adanya hama dan penyakit ikan	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan laboratorium kesehatan ikan	1. Rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan terhadap hama dan penyakit ikan 2. Rendahnya pengelolaan kualitas air dan pencemaran limbah yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya
		Banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memenuhi perijinan usaha	Fasilitasi perijinan dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal	Persyaratan perijinan usaha belum terpenuhi karena keterbatasan modal
		Kurangnya pengelolaan data dan informasi budidaya perikanan	Pengambilan data yang kurang optimal dikarenakan belum semua pelaku usaha dan potensi usaha terdata	Belum semua pembudidaya melakukan pelaporan usaha dan pencatatan produksi



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
		Kenaikan harga pakan yang menyebabkan biaya/cost produksi tinggi	Ketidakmampuan untuk mengintervensi harga pakan	1. Ketergantungan terhadap pakan pabrikan masih tinggi 2. Keterbatasan SDM dan bahan baku dalam pembuatan pakan mandiri
		Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau yang dapat memengaruhi ketersediaan lahan untuk kegiatan perikanan	Keterbatasan data dan informasi spasial terkait pemanfaatan lahan untuk kegiatan perikanan. Lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan perikanan.	Alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman dan sektor non-perikanan.
2.	Belum optimalnya peningkatan produksi	Masih rendahnya produksi perikanan tangkap	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap	1. Perubahan musim yang menyebabkan gelombang tinggi



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
	perikanan tangkap			2. Peralihan mata pencaharian nelayan dari menangkap ikan menjadi nelayan menangkap benih bening lobster (BBL)
		Pemberdayaan nelayan yang kurang optimal	Keterbatasan SDM dan permodalan nelayan	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan permodalan nelayan belum optimal
		Perlindungan nelayan belum optimal	1.Terbatasnya jaminan sosial dan sarana keselamatan nelayan dari pemerintah 2.Masih rendahnya keikutsertaan nelayan pada program jaminan	Daerah penangkapan ikan yang beresiko tinggi



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
			<p>sosial secara mandiri</p> <p>3. Masih rendahnya kesadaran nelayan menggunakan peralatan keselamatan</p>	
		<p>Penurunan potensi sumberdaya ikan</p>	<p>1. Terbatasnya kewenangan kabupaten dalam konservasi, pengawasan, dan penindakan pelanggaran perikanan</p> <p>2. Belum optimalnya koordinasi dengan provinsi dan pusat</p> <p>3. Tidak mempunyai database terkait sumber daya ikan khususnya di</p>	<p>Kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (overfishing) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan</p>



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
			Samudera Hindia (WPP-573)	
		Adanya konflik nelayan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan	1. Belum optimalnya sosialisasi regulasi kelautan dan perikanan 2. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan	Belum optimalnya forum nelayan
		Banyaknya nelayan yang belum memenuhi perijinan usaha	Pemahaman nelayan terhadap perijinan usaha belum optimal	Fasilitasi perijinan dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal
		Ketersediaan bahan baku belum <i>continue</i>	Terbatasnya intervensi terhadap ketersediaan stock ikan	Belum semua pelaku usaha menjalin kemitraan dengan penyedia bahan baku
3.	Belum optimalnya peningkatan produksi hasil olahan dan pemasaran	Terbatasnya potensi nilai tambah hasil perikanan	Masih terbatasnya fasilitasi sarana dan prasarana usaha pengolahan dan	Kurangnya investasi dalam usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
			Internal	Eksternal
			pemasaran hasil perikanan	
		Proses perijinan usaha pengolahan ikan kurang optimal	Terbatasnya jumlah tenaga teknis yang kompeten di bidang perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kesadaran pelaku usaha terhadap jaminan mutu hasil perikanan masih rendah
		Terbatasnya Pengelolaan Manajemen Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kurangnya fasilitasi bimbingan teknis Manajemen Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Keterbatasan kemampuan SDM pelaku usaha pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Keterbatasan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Terbatasnya fasilitasi akses pasar Produk Olahan Hasil Perikanan	Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kesulitan dalam jalur distribusi produk

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan



Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya;
2. Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tangkap; dan
3. Belum optimalnya peningkatan produksi hasil olahan dan pemasaran.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi biru (termasuk perikanan budidaya berbasis ekspor, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya laut)
2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan ketahanan pangan



3. Penguatan ketahanan pangan

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan kabupaten.kota, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2026 yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur:

1. Meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya;
2. Meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap; dan
3. Meningkatnya pertumbuhan produk olahan yang bermutu.

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 – 2044. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perikanan memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.15 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan produktivitas perikanan	Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor perikanan, ketersediaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi, serta peningkatan akses pasar bagi produk perikanan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha perikanan turut mendorong peningkatan produktivitas.	Keterbatasan pelatihan dan bimtek yang mendukung produktivitas perikanan, perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil perikanan, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung produksi perikanan yang efisien.
2	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Pemerintah daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur perikanan	Tantangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah pesisir yang masih terbatas
3	Pengembangan budidaya perikanan air tawar melalui budidaya di kolam dan sungai	Ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang mendukung budidaya ikan, adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap produk ikan	Standart parameter kualitas air baik secara kualitas maupun kuantitas yang tidak stabil



No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
4	Perbaiki pemasaran hasil perikanan	Akses pasar yang lebih luas melalui teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk perikanan yang berkualitas.	Persaingan yang ketat dengan produk perikanan dari daerah lain, terbatasnya jaringan distribusi yang efisien, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha perikanan dalam mengelola branding dan pemasaran produk

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa arah pengembangan sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai aspek mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan sarana dan prasarana, pengembangan pelaku usaha perikanan, hingga optimalisasi pemasaran. Potensi ini di dukung dengan ketersediaan sumber daya alam, peluang pasar yang terbuka, serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Secara keseluruhan, meskipun ada faktor pendorong yang signifikan, pengelolaan yang lebih baik terhadap faktor penghambat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Pacitan.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta



makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan adalah Optimalisasi peningkatan produktivitas perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.16 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Pacitan memiliki wilayah pesisir dengan potensi wisata bahari dan hasil perikanan	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tangkap	Optimalisasi peningkatan produktivitas perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan		Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan salah satunya melalui peningkatan	Potensi pada sektor perikanan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. <i>Sumber : Rancangan RPJMD Prov. Jatim</i>	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap <i>Sumber : Relayout Narasi RPJMN 2025-2029</i>		



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Pacitan memiliki wilayah pesisir dengan potensi wisata bahari dan hasil perikanan	Belum optimalnya Peningkatan produksi perikanan budidaya	Optimalisasi peningkatan produktivitas perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan		Ketergantungan pada pakan pabrikan dalam budidaya perikanan	Potensi pada sektor perikanan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. <i>Sumber : Rancangan RPJMD Prov. Jatim</i>	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya




Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Pacitan memiliki wilayah pesisir dengan potensi wisata bahari dan hasil perikanan	Belum optimalnya peningkatan produksi hasil olahan dan pemasaran	Optimalisasi peningkatan produktivitas perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan		Rendahnya standarisasi produk	Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi dan sumber daya lokal yang beragam, termasuk sektor perikanan, namun potensi tersebut <i>Sumber : Rancangan RPJMD Prov. Jatim</i>	Peningkatan Produk Hasil Olahan Perikanan yang Bermutu

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; dan
3. Peningkatan Produk Hasil Olahan Perikanan yang Bermutu.



BAB III
TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi dan misi Kabupaten Pacitan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pacitan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, yaitu:

“ PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA ”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan.

Sedangkan Misi Kabupaten Pacitan dalam mendukung visi tersebut antara lain:



Misi 1. Pemberantasan Kemiskinan

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Misi 2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

Misi 3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat



mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan. Meningkatkan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris dan sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan.

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan pada sektor lain. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark menjadi salah satu modal dasar pengembangan pariwisata Pacitan. Sektor agraris sebagai penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Pacitan wajib untuk dimaksimalkan dengan pemetaan potensi baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Peningkatan kerjasama investasi dengan pihak lain untuk meningkatkan realisasi investasi diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, serta Entrepreneur muda perlu untuk terus difasilitasi untuk bisa meningkatkan pendapatannya.

Percepatan pembangunan infrastruktur prioritas sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi masyarakat, penyediaan sarana air bersih dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Pembangunan infrastruktur berwawasan kawasan dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat jenis kebutuhan infrastruktur setiap wilayah.



Pertumbuhan ekonomi yang positif harus tetap menjaga dan mempertahankan lingkungan Pacitan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Pembangunan yang telah dilaksanakan harus dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Misi 4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang *agile* (lincah) yang dinamis mengikuti dinamika regulasi yang ada, profesional, terbuka, inovatif, dan melayani masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Proses perencanaan hingga pelaksanaan harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu birokrasi sebagai pelayanan masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik baik pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta transparan atas regulasi dan kebijakan yang dilaksanakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi juga mengharuskan para pegawai ASN untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada saat ini kualitas birokrasi Kabupaten Pacitan perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 4.0.



Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan memiliki keterkaitan dengan Misi ketiga yaitu “Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan kesatu yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan Daerah yang Inklusif sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.



Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran RPJMD: Meningkatnya daya saing sektor unggulan daerah yang inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		NTN	100,30	100,60	100,90	101,20	101,50	101,80	101,80	
NSPK: 1.Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan			NTPi	100,25	100,50	100,75	101	101,25	101,5	101,5	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(TPI). 3. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 4. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. 5. Pengelolaan pembudidayaan ikan 6. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
		Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	3	3	3	3	3	3	3	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		IKM	Nilai	90	93	93,5	94	94,5	95		

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025



Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin di capai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025



3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2 Perumusan Strategi Sasaran 1 Bidang Perikanan Tangkap

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Sumber pemenuhan kebutuhan pangan lokal, nasional, dan ekspor	Terjadi degradasi sumber daya ikan dan tidak ada pembaharuan potensi lestari
	Dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan tangkap	Pencemaran limbah rumah tangga, deforestasi, dan sedimentasi
	Program pemerintah untuk perlindungan nelayan	Nelayan merupakan pekerja rentan dengan resiko kerja yang tinggi
	Dapat dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata bahari	Adanya konflik pemanfaatan ruang



	Sebagai sumber pendapatan daerah	Perubahan iklim dapat memengaruhi hasil tangkapan ikan, sehingga memengaruhi retribusi TPI. Akibatnya retribusi tidak dapat memenuhi target dan kebutuhan operasional membebani anggaran daerah
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi di WPP 573 dan panjang pantai 71 km sebagai habitat ikan-ikan karang termasuk BBL	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap bagi kelompok nelayan	Sosialisasi pelatihan dan Bimtek untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan tangkap
Memiliki potensi perairan umum daratan berupa waduk, sungai, telaga, cekdam, dan genangan air lainnya	Restocking ikan untuk perairan umum	Monitoring dan evaluasi pengelolaan TPI
Jumlah nelayan kecil cukup besar, tersebar di sepanjang desa pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi PUD	Program Jamsostek bagi nelayan	
Panjang pantai 71km yang melewati 7	Penyelenggaraan pelayanan di TPI	



kecamatan dan 26 desa pesisir sehingga banyak terdapat tempat pendaratan ikan		
Beberapa tempat pendaratan ikan telah dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan dan telah ada regulasi Perda Pendapatan Daerah dan Redistribusi Daerah (Perda PDRD)	Perijinan usaha perikanan tangkap	
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Penangkapan ikan oleh nelayan sangat tergantung pada musim dan cuaca. Nelayan lokal juga banyak yang beralih menjadi penangkapan BBL	Penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap	Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap
Pemanfaatan perairan umum daratan untuk usaha perikanan belum optimal	Pembangunan, perbaikan/rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana produksi perikanan tangkap	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk penataan ruang dan pengembangan usaha perikanan tangkap
Pemahaman nelayan tentang perlindungan diri dan kepesertaan Jamsostek masih rendah		



Prasarana produksi di tempat pendaratan ikan banyak yang mengalami kerusakan		
Fasilitas, sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan banyak yang mengalami kerusakan		

Tabel 3.3 Perumusan Strategi Sasaran 1 Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Beragamnya diversifikasi produk perikanan budidaya	Rentan terhadap serangan penyakit (virus, bakteri, jamur)
	Peningkatan mutu produksi budidaya	Terjadi kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah usaha perikanan budidaya
	Kemajuan dan dukungan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran online	Adanya persaingan usaha perikanan budidaya
	Terbukanya kesempatan ekspor produk perikanan budidaya	Ketidakstabilan ekonomi



	Usaha perikanan budidaya yang terintegrasi	Adanya perubahan regulasi terkait kegiatan perikanan budidaya
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Memiliki potensi lahan yang sesuai untuk usaha perikanan budidaya	Pengembangan induk dan benih unggul serta pemilihan jenis ikan yang tepat untuk dibudidayakan	Melaksanakan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan
Tersedianya benih ikan untuk usaha perikanan budidaya	Penggunaan teknik budidaya yang sesuai standar	Pembinaan dan pemantauan usaha perikanan budidaya
Adanya dukungan dari pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Pemilihan lokasi budidaya yang strategis	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi budidaya
Teknologi budidaya semakin canggih (KJA, biofloc, teknologi digital)		
Tersedianya akses pasar yang luas bagi usaha perikanan budidaya		
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Memiliki tingkat resiko kematian ikan yang tinggi	Memanfaatkan modal untuk menerapkan teknologi budidaya	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya



	yang efektif dan efisien	
Membutuhkan modal awal yang cukup besar untuk penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan	Pembudidaya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan dan workshop	Menerapkan inovasi budidaya melalui penggunaan pakan alternatif
Keterbatasan SDM yang memiliki ilmu budidaya yang mumpuni	Meningkatkan kreatifitas pembudidaya ikan	Melakukan sosialisasi regulasi yang up to date
Rendahnya manajemen kualitas air		
Tingginya harga pakan yang mempengaruhi usaha perikanan budidaya		

Tabel 3.4 Perumusan Strategi Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Inovasi teknologi pengolahan ikan	Fluktuasi harga bahan baku
	Peningkatan kualitas produk olahan hasil perikanan	Perubahan kebijakan pemerintah
	Meningkatnya permintaan pasar	Persaingan dengan produk olahan perikanan dari luar daerah atau produk



		lokal sejenis yang lebih terstruktur dapat mengurangi pangsa pasar.
	Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait (instansi lain, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga keuangan)	Perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, atau perubahan habitat ikan dapat mengganggu ketersediaan sumber daya perikanan
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Sumberdaya ikan yang melimpah	Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk : Manfaatkan kekuatan bahan baku dan pengalaman masyarakat untuk mengembangkan variasi produk olahan perikanan yang inovatif.	Meningkatkan manajemen stock bahan baku dan menjalin kemitraan
Kualitas bahan baku yang baik	Meningkatkan kualitas produk: Manfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan	Peningkatan mutu dan pengembangan produk



	memenuhi standar nasional dan internasional.	
Potensi pemasaran ekspor yang besar	Memperluas jangkauan pasar: Manfaatkan peluang peningkatan permintaan dengan memperluas jangkauan pasar lokal, nasional, dan internasional.	Melakukan strategi pemasaran yang tepat
Ketersediaan tenaga kerja yang terampil	Meningkatkan kolaborasi untuk pelatihan, bimtek, workshop untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM tentang pengolahan ikan	Pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan <i>zero waste</i>
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kapasitas produksi yang terbatas	Meningkatkan promosi produk perikanan : penggunaan teknologi, peningkatan kemasan, pengembangan branding, kolaborasi	Pengembangan produk dengan bahan baku alternatif yang lebih stabil harga dan ketersediaannya



Mutu produk olahan perikanan belum terjamin (belum seragam dan standar nasional ataupun internasional)	Penerapan standar jaminan mutu produk olahan perikanan	Pemantauan kualitas produk olahan hasil perikanan dan sosialisasi perubahan regulasi yang ada
Promosi dan pemasaran produk olahan perikanan kurang efektif	Peningkatan pemahaman pasar yang lebih mendalam dan terarah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen.	Menjalin kemitraan pemasaran dan pengembangan strategi pemasaran secara digital
Penggunaan teknologi dalam pengolahan belum optimal.	Dukungan finansial dan infrastruktur pengembangan usaha pengolahan ikan	Diversifikasi pada bahan baku (jenis ikan) yang diolah dan pengelolaan limbah pengolahan

Tabel 3.5 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap)	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap bagi kelompok nelayan	1. Menyediakan bantuan sarana yang sesuai spesifikasi kebutuhan nelayan 2. Melaksanakan pemeliharaan sarana secara berkala
		Restocking ikan untuk perairan umum	1. Melakukan penebaran benih ikan secara berkala di perairan umum 2. Melarang penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		Program Jamsostek bagi Nelayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan regulasi (Perbup) sebagai dasar pelaksanaan Program Jamsostek bagi pelaku usaha perikanan 2. Fasilitasi pendaftaran Program Jamsostek bagi pelaku usaha perikanan baik yang dibiayai pemerintah maupun mandiri
		Penyelenggaraan pelayanan di TPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sistem pelayanan TPI yang transparan dan akuntabel 2. Memfasilitasi perbaikan fasilitas penunjang (cold storage, timbangan digital, kebersihan) di TPI
		Perijinan usaha perikanan tangkap	Fasilitasi pengurusan perizinan melalui layanan terpadu
		Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelatihan teknis penangkapan ramah lingkungan 2. Mengembangkan kelembagaan KUB dan Pokmaswas melalui bimtek dan pendampingan usaha
		Monitoring dan evaluasi pengelolaan TPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audit berkala terhadap pemungutan retribusi di TPI 2. Menyusun laporan evaluasi untuk perbaikan layanan TPI
		Penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap	Membentuk forum komunikasi antar kelompok nelayan
		Pembangunan, perbaikan/rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana produksi perikanan tangkap	Melaksanakan perbaikan berkala pada prasarana yang rusak



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap	Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha baru
		Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan pendataan potensi lestari dan kondisi ekosistem laut secara berkala	Menyusun database perikanan sesuai kewenangan kabupaten sebagai penentuan kebijakan
	Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan (Bidang Perikanan Budidaya)	Pengembangan induk dan benih unggul serta pemilihan jenis ikan yang tepat untuk dibudidayakan	Menyediakan benih ikan unggul
		Penggunaan teknik budidaya yang sesuai standar	Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis standar operasional budidaya
		Pemilihan lokasi budidaya yang strategis	Melakukan survei lokasi potensial dengan mempertimbangkan kualitas air dan aksesibilitas
		Melaksanakan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan	1. Mendorong penggunaan pakan organik dan ramah lingkungan 2. Mengontrol limbah budidaya agar tidak mencemari lingkungan
		Pembinaan dan pemantauan usaha perikanan budidaya	Monitoring dan evaluasi secara rutin ke lokasi budidaya
		Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi budidaya	1. Memfasilitasi kerja sama pembudidaya ikan dengan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan 2. Meningkatkan kemitraan usaha dan memperluas jaringan pemasaran hasil produksi perikanan



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		Memanfaatkan modal untuk menerapkan teknologi budidaya yang efektif dan efisien	Fasilitasi pelatihan terkait optimalisasi penerapan teknologi (sarana dan prasarana) bagi pembudidaya untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi
		Pembudidaya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan dan workshop	Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dan teknologi budidaya modern yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Swasta/ Dinas dan OPD terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kementerian
		Meningkatkan kreatifitas pembudidaya ikan	Memberikan apresiasi/penghargaan bagi pembudidaya yang menghasilkan inovasi produk
		Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Melaksanakan pengendalian kesehatan ikan melalui monitoring dan uji laboratorium
		Menerapkan inovasi budidaya melalui penggunaan pakan alternatif	Memfasilitasi Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi / Balai / Badan terkait penggunaan pakan alternatif
		Melakukan sosialisasi regulasi yang up to date	Penyebarluasan informasi bekerja sama dengan media cetak, elektronik dan sosial;
		Pengembangan komoditas unggulan dan bernilai ekonomis tinggi baik budidaya air tawar, air laut maupun air payau	Penerapan teknologi budidaya yang adaptif dan efisien



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		Melakukan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
2	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk	Memanfaatkan kekuatan bahan baku dan pengalaman masyarakat untuk mengembangkan variasi produk olahan perikanan yang inovatif
		Meningkatkan kualitas produk	Melakukan uji kualitas produk secara berkala
		Memperluas jangkauan pasar	Memanfaatkan peluang peningkatan permintaan dengan memperluas jangkauan pasar lokal, nasional, dan internasional.
		Meningkatkan kolaborasi untuk pelatihan, bimtek, workshop untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM tentang pengolahan ikan	Menyelenggarakan Inovasi Bimbingan Teknis Wani Asah Ikan yang dilaksanakan di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan
		Meningkatkan manajemen <i>stock</i> bahan baku dan menjalin kemitraan	1. Memastikan ketersediaan pasokan ikan segar dari nelayan dan pembudidaya melalui kemitraan 2. Mengoptimalkan distribusi bahan baku ke pelaku usaha pengolahan secara tepat waktu dan efisien
		Peningkatan mutu dan pengembangan produk	1. Melaksanakan pelatihan penerapan standar mutu bagi pelaku usaha pengolahan 2. Fasilitasi sertifikasi jaminan mutu produk olahan hasil perikanan



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
			dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, BPOM, BSN, dan instansi terkait
		Pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan <i>zero waste</i>	Mensosialisasikan penggunaan kemasan ramah lingkungan
		Meningkatkan promosi produk perikanan	Penggunaan teknologi, peningkatan kemasan, pengembangan branding, kolaborasi
		Penerapan standar jaminan mutu produk olahan perikanan	1. Melaksanakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Memberikan fasilitasi sertifikasi jaminan mutu produk olahan hasil perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, BPOM, BSN, dan instansi terkait;
		Peningkatan pemahaman pasar yang lebih mendalam dan terarah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen.	1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pasar hasil perikanan 2. Memantau perkembangan pasar terkait produk olahan hasil perikanan 3. Mengidentifikasi tren pasar, pola permintaan, dan potensi pasar
		Dukungan finansial dan infrastruktur pengembangan usaha pengolahan ikan	Fasilitasi akses permodalan bekerjasama dengan koperasi, lembaga keuangan dan perbankan



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		Pengembangan produk dengan bahan baku alternatif yang lebih stabil harga dan ketersediaannya	Melakukan identifikasi terkait bahan baku alternatif
		Pemantauan kualitas produk olahan hasil perikanan dan sosialisasi perubahan regulasi yang ada	Melaksanakan inspeksi secara rutin terkait kualitas produk
		Menjalin kemitraan pemasaran dan pengembangan strategi pemasaran secara digital	Membangun kemitraan dengan pelaku usaha, koperasi, dan platform <i>e-commerce</i>
		Diversifikasi pada bahan baku (jenis ikan) yang diolah dan pengelolaan limbah pengolahan	1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi berbagai jenis ikan lokal yang layak di olah menjadi produk bernilai tambah 2. Mendorong inovasi pengolahan limbah menjadi produk turunan bernilai ekonomi

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan



guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan	Fasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap	1. Pemenuhan sarana dan prasarana di sentra produksi perikanan 2. Wilayah potensi perikanan sebagai sentra pengembangan wilayah	
			Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha perikanan	1. Pelaku Usaha Perikanan sebagai sentra pemberdayaan 2. Regenerasi Nelayan	
			Peningkatan SDM perikanan dan kelembagaan usaha perikanan	Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek yang dilaksanakan oleh Pemkab maupun bekerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMN, Akademisi, Swasta, dll)	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Mempermudah akses permodalan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan	
			Menetapkan regulasi (Perbup) sebagai dasar pelaksanaan Program Pembangunan Perikanan	Fasilitasi Regulasi Program Pembangunan Perikanan yang dibiayai Pemerintah, swasta maupun mandiri	
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Akademisi untuk melaksanakan pendataan potensi lestari dan kondisi ekosistem perairan laut secara berkala	Menyusun database perikanan sesuai kewenangan Kabupaten sebagai arah penentuan kebijakan dan bahan pendataan lebih lanjut	
			Meningkatkan koordinasi antar kelompok perikanan dan antar wilayah	Menyelenggarakan berbagai forum untuk meningkatkan kerukunan dan kerja sama	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pendampingan perijinan kepada pelaku usaha perikanan	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan ijin usaha perikanan	
		Mengoptimalkan konservasi lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem dan penghijauan daerah kritis	Pendampingan kelembagaan kelompok nelayan (POKMAWAS, POKWISRI, KOMPAK) dalam upaya pelestarian wilayah usaha perikanan	Menyelenggarakan berbagai sosialisasi, pelatihan dan forum untuk meningkatkan upaya pelestarian wilayah usaha perikanan	
			Fasilitasi sarana pelestarian wilayah usaha perikanan	Penyediaan sarana pelestarian ekosistem perikanan	
2.	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Mengembangkan infrastruktur logistik dan jaringan distribusi untuk mendukung sektor unggulan	Fasilitasi sarana prasarana tempat pelelangan ikan dan tempat pendaratan ikan	Penyediaan sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan	
				Meningkatkan koordinasi dengan	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pihak terkait dalam pelayanan di tempat pelelangan ikan dan tempat pendaratan ikan	
3.	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pendampingan perijinan kepada pelaku usaha perikanan	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan ijin usaha perikanan	
4.	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Peningkatan SDM perikanan dan kelembagaan usaha perikanan	Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek yang dilaksanakan oleh Pemkab maupun bekerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMN, Akademisi, Swasta, dll)	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan	Mempermudah akses permodalan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan	
			Peningkatan SDM perikanan dan kelembagaan usaha perikanan	Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek yang dilaksanakan oleh Pemkab maupun bekerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMN, Akademisi, Swasta, dll)	
				Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi sistem jaminan mutu	
6.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang	Pendampingan pelaku usaha dalam melaksanakan sistem jaminan	Peningkatan fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan	mutu dan keamanan pangan		
				Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi sistem jaminan mutu	
				Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Penerapan Sistem Jaminan Mutu	
				Penyebarluasan Informasi, Publikasi, dan Promosi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
			Peningkatan Konsumsi Ikan	Melaksanakan Kampanye, Edukasi Gemarikan dan promosi produk olahan hasil perikanan	
				Melaksanakan bimbingan teknis	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				diversifikasi produk olahan hasil perikanan	
			Penguatan Kelembagaan Usaha Pengolahan Ikan	Peningkatan akses permodalan usaha pengolahan dan pemasaran ikan	
				Meningkatkan ketersediaan data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk olahan hasil perikanan yang akurat	
				Meningkatkan kemitraan pemasaran dan teknologi produk olahan hasil perikanan	

3.4 Pentahapan Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Pentahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan di daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:



Tabel 3.7 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>Transformasi SDM untuk meningkatkan pelayanan bidang perikanan</p> <p>Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor perikanan, baik aparatur dinas maupun pelaku usaha perikanan, agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan inovatif. Dalam tahap ini meliputi:</p>	<p>Optimalisasi Sistem Pendukung Sektor Perikanan dan Kelautan</p> <p>Tahap ini diarahkan untuk memperkuat sistem pendukung bagi pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan manajemen usaha, kelembagaan pelaku perikanan, dan inovasi teknologi perikanan. Dalam tahap ini meliputi:</p>	<p>Penguatan Daya Saing untuk Perluasan Akses Pasar</p> <p>Tahap ini bertujuan untuk mendorong penerapan standar mutu dan sertifikasi produk hasil perikanan dan memperluas akses pasar bagi produk perikanan lokal. Dalam tahap ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sertifikasi produk hasil perikanan. 2. Penerapan standar mutu produk budidaya dan tangkap. 	<p>Penguatan Kemandirian Kelembagaan Pelaku Usaha</p> <p>Tahap ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian pelaku usaha perikanan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan akses permodalan. Dengan kelembagaan yang semakin solid serta dukungan permodalan yang kuat, pelaku usaha perikanan diharapkan mampu mengelola usahanya secara</p>	<p>Terwujudnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan</p> <p>Tahap ini berfokus pada pencapaian tujuan akhir pembangunan sektor perikanan, yaitu terwujudnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan secara menyeluruh. Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan akan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,</p>

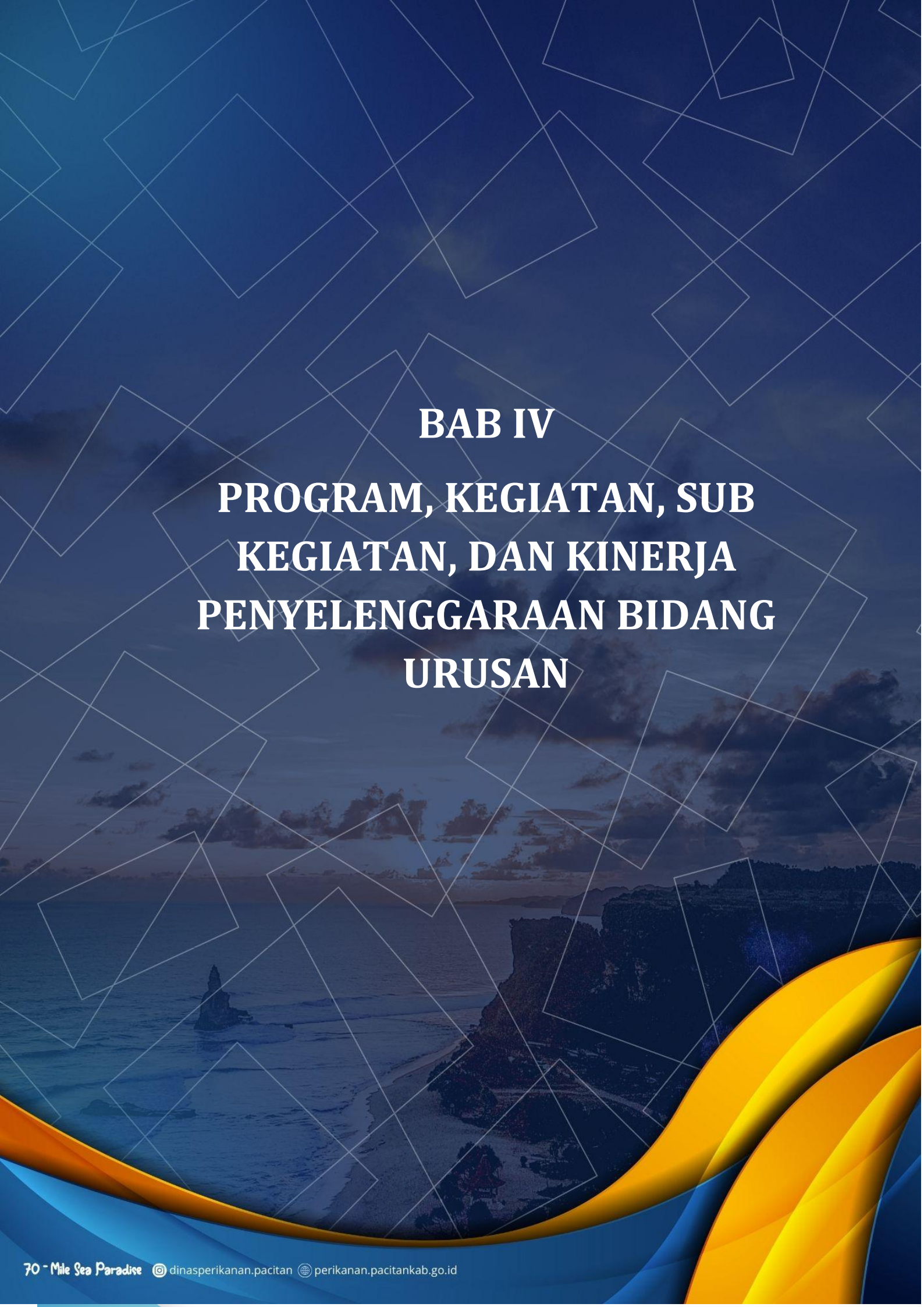


TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>1. Pelatihan bagi pelaku usaha perikanan.</p> <p>2. Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Perikanan</p> <p>3. Sosialisasi penerapan teknologi ramah lingkungan.</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas manajemen pelaku usaha perikanan.</p> <p>2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi lokal.</p> <p>3. Sosialisasi pemanfaatan teknologi budidaya dan tangkap modern.</p> <p>4. Pengembangan sistem informasi perikanan daerah.</p> <p>5. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif perikanan.</p>	<p>3. Promosi dan ekspansi pasar hasil perikanan lokal.</p> <p>4. Peningkatan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p> <p>5. Dukungan terhadap pengembangan industri hilir berbasis perikanan.</p>	<p>mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.</p> <p>Dalam tahap ini meliputi :</p> <p>1. Fasilitasi akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.</p> <p>2. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan.</p> <p>3. Pendampingan usaha perikanan agar mampu berdaya saing</p> <p>4. Penguatan jejaring kerja sama antar daerah dan dengan sektor swasta.</p> <p>5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk.</p>	<p>memperkuat kelembagaan nelayan dan pembudidaya, serta memastikan keberlanjutan usaha perikanan yang ramah lingkungan. Langkah implementatif dalam tahap ini meliputi:</p> <p>1. Penguatan sistem distribusi dan jaringan pasar hasil perikanan antar daerah dan pelaku usaha</p> <p>2. Fasilitasi akses pembiayaan usaha perikanan</p> <p>3. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran hasil perikanan berbasis potensi lokal dan ekspor</p>



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
				4. Penerapan dan pengawasan pengelolaan sumber daya ikan yang sesuai dengan kaidah keberlanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan konservasi ekosistem perairan 5. Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025



BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran RPJMD: Meningkatnya daya saing sektor unggulan daerah yang inklusif NSPK: Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya Ikan				1. NTN 2. NTPi		
		Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan		
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap PUD (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap PUD (Ton)	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Meningkatnya pemenuhan regulasi kapal perikanan	Produksi Perikanan Tangkap PUD (Ton)	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sampai dengan 10 GT	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
				Diterbitkannya Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Diterbitkannya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Meningkatnya pemenuhan regulasi kapal perikanan	Produksi Perikanan Tangkap PUD (Ton)	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosuder Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	
				Meningkatnya pemenuhan regulasi kapal perikanan	Produksi Perikanan Tangkap PUD (Ton)	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai,	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	
				Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	
Pengelolaan dan penyelenggaraan				Meningkatnya Pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap Laut (Ton)	Kegiatan Pengelolaan dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tempat Pelelangan Ikan (TPI).						Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.				Meningkatnya produksi perikanan budidaya (%)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
<p>Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p>				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya (%)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
Pengelolaan pembudidayaan ikan				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan pembudidayaan ikan				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten/Kota	
Pengelolaan pembudidayaan ikan				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan		Meningkatnya Produksi Olahan Produk Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
para pemangku kepentingan							
			Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan		Produksi Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				Tersedianya database usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah UPI yang terdaftar	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				Terlaksananya Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET (8)
						sesuai Skala Usaha dan Risiko	
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat	Terlaksananya penilaian sakisip	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Daerah yang Akuntabel			n Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Sub Kegiatan Penyusunan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
						Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Kegiatan PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan Mesin Lainnya	
						Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIAT AN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.267.402.235,00		5.530.373.000,00		5.752.004.000,00		6.382.084.000,00		7.021.367.000,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	nilai	79,70	79,0	3.758.490.928	79,75	3.925.234.763,00	79,80	4.121.097.000,00	79,85	4.286.357.000,00	79,9	4.457.811.000,00	80,0	4.636.123.000,00			
Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	nilai	79,70	79,0	3.758.490.928	79,75	3.925.234.763,00	79,80	4.121.097.000,00	79,85	4.286.357.000,00	79,9	4.457.811.000,00	80,0	4.636.123.000,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	23	23	106.450.753	23	9.049.740,00	23	104.129.570,00	23	113.102.900,00	23	166.122.900,00	23	171.622.900,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		0			0	9.049.740,00	0	104.129.570,00	6	113.102.900,00	6	166.122.900,00	6	171.622.900,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		0			1		1		1		1		1				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RKA-SKPD (Dokumen)																		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		12			12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0			0		1		1		1		1					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7			7		7		7		7		7				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0			2		2		2		2		2				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		0			0		12		12		12		12				
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	7	11	73.980.000	7	3.190.270,00	7	94.480.000,00	7	96.280.000,00	7	150.600.000,00	7	152.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Perangkat Daerah	n Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	dokumen	7	11	73.980.000	7	3.190.270,00	7	94.480.000,00	7	96.280.000,00	7	150.600.000,00	7	152.000.000,00				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	1	1.000.000,00	1	700.000,00	1	850.000,00	1	1.000.000,00	1	1.350.000,00				
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	dokumen	1	1	-	1	1.000.000,00	1	700.000,00	1	850.000,00	1	1.000.000,00	1	1.350.000,00				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	-	1	829.900,00	1	700.000,00	1	850.000,00	1	1.000.000,00	1	1.350.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	dokumen	1	1	-	1	829.900,00	1	700.000,00	1	850.000,00	1	1.000.000,00	1	1.350.000,00				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	1	600.000,00	1	800.000,00	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	1	1.800.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	-	1	600.000,00	1	800.000,00	1	1.000.000,00	1	1.200.000,00	1	1.800.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	32.470.753	12	3.429.570,00	12	3.729.570,00	12	5.602.900,00	12	3.802.900,00	12	5.602.900,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	laporan	12	12	32.470.753	12	3.429.570,00	12	3.729.570,00	12	5.602.900,00	12	3.802.900,00	12	5.602.900,00			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	12 data	12 data	-	-	0,00	12	720.000,00	12	720.000,00	12	720.000,00	12	720.000,00			
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Data	12 data	12 data	-	-	0,00	12	720.000,00	12	720.000,00	12	720.000,00	12	720.000,00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusa	dokumen	6 dokumen	-	-	0,00	-	0,00	6	4.800.000,00	6	4.800.000,00	6	5.800.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	dokumen	6 dokumen	-	-	0,00	-	0,00	6	4.800.000,00	6	4.800.000,00	6	5.800.000,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	2.663.193.678	59	3.033.158.046,00	59	3.040.216.776,00	59	3.043.426.776,00	59	3.043.629.676,00	59	3.043.629.676,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	2.657.988	3.033.158.046,00	26	3.040.216.776,00	26	3.043.426.776,00	26	3.043.629.676,00	26	3.043.629.676,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		59			59		59		59		59		59				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0			0		24		24		24		24				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0			0		24		24		24		24				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	21 Orang /Bulan	26 Orang /Bulan	2.657.988.808	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	2.657.988.808	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00	26	3.029.953.176,00			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	24 dokumen	-	-	-	0,00	24	3.500.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	dokumen	24 dokumen	-	-	-	0,00	24	3.500.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	24 laporan	-	-	-	-	24	3.500.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	laporan	24 laporan	-	-	-	-	24	3.500.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00	24	4.080.000,00				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	59 Laporan	59 Laporan	5.204.870	59	3.204.870,00	59	3.263.600,00	59	5.313.600,00	59	5.516.500,00	59	5.516.500,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	59 Laporan	59 Laporan	5.204.870	59	3.204.870,00	59	3.263.600,00	59	5.313.600,00	59	5.516.500,00	59	5.516.500,00				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.000.000,00		1.300.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00				
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	0			12	1.000.000,00	12	1.300.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Daerah pada SKPD (Laporan)																		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan					1.000.000,00		1.300.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00				
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	laporan	0			12	1.000.000,00	12	1.300.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang dikelola administrasinya	%	100%	100%	25.505.800	100%	43.047.200,00	100%	11.543.600,00	100%	75.543.600,00	100%	51.843.600,00	100%	75.543.600,00				
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	orang	0	-	-	0	43.047.200,00	2	11.543.600,00	2	75.543.600,00	2	51.843.600,00	2	75.543.600,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	25.505.800	12	43.047.200,00	2	11.543.600,00	2	75.543.600,00	2	51.843.600,00	2	75.543.600,00			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	25.505.800	12	43.047.200,00	2	11.543.600,00	2	75.543.600,00	2	51.843.600,00	2	75.543.600,00			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	25.505.800	12	43.047.200,00	2	11.543.600,00	2	75.543.600,00	2	51.843.600,00	2	75.543.600,00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Orang	2 orang	-	-	-	0,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0			0	0,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	belanja jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas	%	100%	100%	144.876.980	100%	144.050.700,00	100%	149.901.500,00	100%	189.441.311,00	100%	226.787.235,00	100%	334.499.235,00				
Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu	paket	9 paket	9 paket	2.000.220	144.050.700,00	9	149.901.500,00	9	189.441.311,00	9	226.787.235,00	9	334.499.235,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		nan Kantor yang Disediakan																	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2			12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12			12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		0			0		6		6		6		6					
	Jumlah Paket Bahan Logistik		2			12		12		12		12		12					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Kantor yang Disediakan (Paket)																		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		0			0		0		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		2			0		0		0		1		0					
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		2			2		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6			6		6		6		6		6					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	yang Disediakan (Paket)																		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9 paket	9 paket	2.000.220	1.995.000,00	9	1.999.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	paket	9 paket	9 paket	2.000.220	1.995.000,00	9	1.999.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00	9	4.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Kantor yang Disediakan																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6 Paket	6 Paket	31.541.560	6	24.733.200,00	6	42.607.370,00	6	57.073.981,00	6	63.169.905,00	6	81.381.905,00				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	6 Paket	6 Paket	31.541.560	6	24.733.200,00	6	42.607.370,00	6	57.073.981,00	6	63.169.905,00	6	81.381.905,00				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	61.002.000	2	67.295.130,00	2	50.795.130,00	2	55.795.130,00	2	50.795.130,00	2	65.795.130,00				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	paket	2	2	61.002.000	2	67.295.130,00	2	50.795.130,00	2	55.795.130,00	2	50.795.130,00	2	65.795.130,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	yang Disediakan (Paket)																		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	8.340.200	12	4.027.000,00	12	11.500.000,00	12	11.750.000,00	12	13.000.000,00	12	12.500.000,00				
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	paket	2	2	8.340.200	12	4.027.000,00	12	11.500.000,00	12	11.750.000,00	12	13.000.000,00	12	12.500.000,00				
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2	1.995.400,00	2	4.000.000,00	2	4.004.600,00	2	4.004.600,00	2	4.004.600,00				
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2	1.995.400,00	2	4.000.000,00	2	4.004.600,00	2	4.004.600,00	2	4.004.600,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6 laporan	-	-	-	0,00	6	3.000.000,00	6	3.600.000,00	6	3.600.000,00	6	3.600.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6 laporan	-	-	0	0,00	6	3.000.000,00	6	3.600.000,00	6	3.600.000,00	6	3.600.000,00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	35.603.000	12	44.004.970,00	12	36.000.000,00	12	52.017.600,00	12	52.017.600,00	12	62.017.600,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	35.603.000	12	44.004.970,00	12	36.000.000,00	12	52.017.600,00	12	52.017.600,00	12	62.017.600,00			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 dokumen	-	-	-	0,00	-	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	101.200.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	1 dokumen	-	-	-	0,00	-	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	101.200.000,00			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	2	2	4.390.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	35.000.000,00	-	0,00			
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	dokumen	2	2	4.390.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	35.000.000,00	-	0,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	belanja jasa kantor	%	100 %	100 %	3.013.800	100 %	42.889.050,00	100 %	55.000.000,00	100 %	102.614.824,00	100 %	52.000.000,00	100 %	187.200.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			unit	1 unit	1 unit	3.013.800	42.889.050,00	2	55.000.000,00	3	102.614.824,00	3	52.000.000,00	3	187.200.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0			2		1		2		1		2				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	-	-	2	21.866.850,00	1	10.000.000,00	2	35.614.824,00	1	15.000.000,00	2	30.000.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	2	-	-	2	21.866.850,00	1	10.000.000,00	2	35.614.824,00	1	15.000.000,00	2	30.000.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1 unit	1 unit	3.013.800	4	21.022.200,00	2	45.000.000,00	3	67.000.000,00	3	37.000.000,00	3	157.200.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	unit	1 unit	1 unit	3.013.800	4	21.022.200,00	2	45.000.000,00	3	67.000.000,00	3	37.000.000,00	3	157.200.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Disediakan (Unit)																		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	belanja jasa kantor, dan honorarium	%	100 %	100 %	686.996 .769	100 %	614.83 3.100,0 0	100 %	635.445 .554,00	100 %	658.66 7.589,0 0	100 %	662.867 .589,00	100 %	665.06 7.589,0 0				
Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12			12	614.83 3.100,0 0	12	635.445 .554,00	12	658.66 7.589,0 0	12	662.867 .589,00	12	665.06 7.589,0 0				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12			12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		12			12		12		12		12		12					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Menyurat (Laporan)																		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.500.000	12	1.500.040,00	12	1.500.000,00	12	2.500.000,00	12	3.500.000,00	12	2.500.000,00				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	12	2.500.000	12	1.500.040,00	12	1.500.000,00	12	2.500.000,00	12	3.500.000,00	12	2.500.000,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	83.578.280	12	53.719.060,00	12	56.719.100,00	12	58.219.100,00	12	60.219.100,00	12	62.219.100,00				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	83.578.280	12	53.719.060,00	12	56.719.100,00	12	58.219.100,00	12	60.219.100,00	12	62.219.100,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	yang Disediakan (Laporan)																		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	600.918.489	12	559.614.000,00	12	577.226.454,00	12	597.948.489,00	12	599.148.489,00	12	600.348.489,00				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	600.918.489	12	559.614.000,00	12	577.226.454,00	12	597.948.489,00	12	599.148.489,00	12	600.348.489,00				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100%	100%	128.453.148	100%	37.206.927,00	100%	123.560.000,00	100%	102.060.000,00	100%	253.060.000,00	100%	157.060.000,00				
Jumlah barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin		1			1	37.206.927,00	1	123.560.000,00	1	102.060.000,00	1	253.060.000,00	1	157.060.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
dalam kondisi baik	Lainnya yang Dipelihara (Unit)																		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		30			1		1		1		1		1					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1			1		1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		0			3		3		3		3		3					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		0			0		3		3		3		3					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	30	54.000.000	1	26.796.927,00	1	45.000.000,00	1	51.000.000,00	1	111.000.000,00	1	96.000.000,00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	30	30	54.000.000	1	26.796.927,00	1	45.000.000,00	1	51.000.000,00	1	111.000.000,00	1	96.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	-	3	4.200.000,00	3	4.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	7.000.000,00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	3	3	-	3	4.200.000,00	3	4.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	7.000.000,00				
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	3 unit	-	-	-	0,00	3	1.500.000,00	3	3.500.000,00	3	3.500.000,00	3	4.500.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	unit	3 unit	-	-	-	0,00	3	1.500.000,00	3	3.500.000,00	3	3.500.000,00	3	4.500.000,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	1	610.000	1	4.010.000,00	1	3.660.000,00	1	8.160.000,00	1	9.160.000,00	1	10.160.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	1	1	610.000	1	4.010.000,00	1	3.660.000,00	1	8.160.000,00	1	9.160.000,00	1	10.160.000,00			
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1	73.843.148	1	2.200.000,00	1	69.400.000,00	1	34.400.000,00	1	124.400.000,00	1	39.400.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	1	73.843.148	1	2.200.000,00	1	69.400.000,00	1	34.400.000,00	1	124.400.000,00	1	39.400.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)																		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	ton	11.09 1,14	12.381	948.589 .046	11.2 57	704.00 0.000,00	11.4 26	739.200 .000,00	11.5 98	768.76 8.000,00	11.7 72	1.199.5 19.000,00	11.9 48	1.331.5 00.000,00				
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil (Ton)		11.09 1,14			11.2 57	704.00 0.000,00	11.4 26	739.200 .000,00	11.5 98	768.76 8.000,00	11.7 72	1.199.5 19.000,00	11.9 48	1.331.5 00.000,00				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	ton	11.09 1,14	12.381	198.909 .646	11.2 57	50.000. 000,00	11.4 26	60.000. 000,00	11.5 98	70.000. 000,00	11.7 72	120.000 .000,00	11.9 48	140.00 0.000,00				
Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin	Unit	3	53	198.909 .646,00	3	50.000. 000,00	3	60.000. 000,00	3	70.000. 000,00	3	120.000 .000,00	3	140.00 0.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Genangan Air Lainnya	dan Tersedia (Unit)																		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	3	53	198.909.646,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	70.000.000,00	3	120.000.000,00	3	140.000.000,00				
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	Unit	3	53	198.909.646,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	70.000.000,00	3	120.000.000,00	3	140.000.000,00				
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	ton	11.091,14	12.381	659.272.600	11.257	634.000.000	11.426	639.000.000	11.598	649.000.000	11.772	980.000.000	11.948	1.060.000.000				
Jumlah Nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	2.500	3.000	659.272.600	3.000	634.000.000,00	3.000	639.000.000,00	3.000	649.000.000,00	3.000	980.000.000,00	3.000	1.060.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)		50			50		50		50		50		50					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)		0			0		0		0		150		180					
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	2.500 orang	3.000 Orang	622.100.000	500	614.000.000	3.000 orang	614.000.000	3.000 orang	619.000.000	3.000 orang	640.000.000	3.000 orang	650.000.000				
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	2.500	3.000	622.100.000	3.000	614.000.000,00	3.000	614.000.000,00	3.000	619.000.000,00	3.000	640.000.000,00	3.000	650.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	Unit Usaha	50	-	-	50	20.000.000,00	50	25.000.000,00	50	30.000.000,00	50	40.000.000,00	50	50.000.000,00			
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	Unit Usaha	50	-	-	50	20.000.000,00	50	25.000.000,00	50	30.000.000,00	50	40.000.000,00	50	50.000.000,00			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil							0,00		0,00		0,00		300.000.000,00		360.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		K E T
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	Unit	3	-	-	-	-	-	-	-	-	150	300.000.000,00	180	360.000.000,00			
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang Dikelola (Layanan)	layan an	5 layan an	5 layan an	90.406.800	5 layan an	20.000.000	5 layan an	40.200.000	5 layan an	49.768.000	5 layan an	99.519.000	5 layan an	131.500.000			
Jumlah TPI yang dikelola	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	layan an	5 layan an	5 layan an	90.406.800	5 layan an	20.000.000	5 layan an	40.200.000	5 layan an	49.768.000	5 layan an	99.519.000	5 layan an	131.500.000			
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	layan an	5 layan an	5 layan an	90.406.800	5 layan an	20.000.000	5 layan an	40.200.000	5 layan an	49.768.000	5 layan an	99.519.000	5 layan an	131.500.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	layan an	5 layan an	5 laya nan	90.406.800	5 laya nan	20.000.000	5 laya nan	40.200.000	5 laya nan	49.768.000	5 laya nan	99.519.000	5 laya nan	131.500.000			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	1.438,83	2.624	623.563.700	1.520	392.385.515,00	1.561	412.005.000,00	1.639	428.485.000,00	1.721	445.624.000,00	1.808	763.449.000,00			
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	1.438,83	2.624	623.563.700	1.520	392.385.515,00	1.561	412.005.000,00	1.639	428.485.000,00	1.721	445.624.000,00	1.808	763.449.000,00			
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	1.438,83	2.624	230.791.816	1.520	21.000.000,00	1.561	25.000.000,00	1.639	37.000.000,00	1.721	42.000.000,00	1.808	70.000.000,00			
Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	kelom pok	30 Kelom pok	26 Kelo mpok	208.336.700	0	21.000.000,00	0	25.000.000,00	3	37.000.000,00	3	42.000.000,00	3	70.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Usahanya (Kelompok)																		
	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	22.455.116	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-				
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan,	kelompok	30 Kelompok	26 Kelompok	208.336.700	-	0,00	-	0,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	20.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya																		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	kelompok	30 Kelompok	26 Kelompok	208.336.700	-	0,00	-	0,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	20.000.000,00				
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	22.455.116	30	21.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	50.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	22.455.116	30	21.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	30.000.000,00	30	50.000.000,00				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	1.438,83	2.624	392.771.884	1.520	371.385.515,00	1.561	387.005.000,00	1.693	391.485.000,00	1.721	403.624.000,00	1.808	693.449.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	unit	5 Unit	8 Unit	375.973.756	5	371.385.515,00	5	387.005.000,00	5	391.485.000,00	5	403.624.000,00	5	693.449.000,00			
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	dokumen	4	-	-	4		4		4		4		4				
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)		0			20		20		20		20		20				
	Jumlah Sarana Prasarana unit		0			0		1		0		0		1				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)																		
	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)		4			4		4		4		4		4					
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	dokumen	4	-	-		38.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	dokumen	4	-	-	4	38.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	5 Unit	8 Unit	375.973.756	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	300.000.000			
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	5 Unit	8 Unit	375.973.756	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	300.000.000			
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam	Dokumen hasil pelaksanaan	dokumen	4	-	-	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	13.000.000,00	4	15.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																		
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	dokumen	4 Dokumen	-	-	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	13.000.000,00	4	15.000.000,00				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	unit	20	-	-	20	125.385.515,00	20	132.005.000,00	20	141.485.000,00	20	150.624.000,00	20	325.449.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		0			20	125.385.515,00	20	132.005.000,00	20	141.485.000,00	20	150.624.000,00	20	325.449.000,00			
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Unit	1	-	-	-	0,00	1	7.000.000,00	-	0,00	-	0,00	1	13.000.000,00			
Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	Unit	1	-	-	-	0,00	1	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	13.000.000,00			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Produksi Olahan Hasil	ton	1.721,97	1.585	256.086.270	1.774	245.781.957,00	1.827	258.071.000,00	1.882	268.394.000,00	1.938	279.130.000,00	1.996	290.295.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perikanan (Ton)																		
Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	ton	1.721,97	1.585	256.086.270	1.774	245.781.957,00	1.827	258.071.000,00	1.882	268.394.000,00	1.938	279.130.000,00	1.996	290.295.000,00				
	Persentase Poklhasar yang meningkat kelasnya (%)		56			40		55		70		85		100					
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	dokumen	1	1	20.000.000,00	-	0,00	1	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
Jumlah Dokumen data dan Informasi Usaha	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran	dokumen	1	1	20.000.000,00	-	0,00	1	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)																		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	dokumen	1	1	20.000.000,00	-	0,00	1	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan	dokumen	1	1	20.000.000,00	-	0,00	1	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	n skala usaha dan risiko (Dokumen)																		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	ton	1.721,97	1.585	151.752.200	1.774	120.500.000,00	1.827	121.644.522,00	1.882	122.000.000,00	1.938	125.000.000,00	1.996	130.000.000,00				
Jumlah Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Unit usaha	60 unit usaha	97 Unit Usaha	151.752.200	60	120.500.000,00	60	121.644.522,00	60	122.000.000,00	60	125.000.000,00	60	130.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	60 unit usaha	97 Unit Usaha	151.752.200	60	120.500.000,00	60	121.644.522,00	60	122.000.000,00	60	125.000.000,00	60	130.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	60 unit usaha	97 Unit Usaha	151.752.200	60	120.500.000,00	60	121.644.522,00	60	122.000.000,00	60	125.000.000,00	60	130.000.000,00			
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	ton	1.721,97	1.585	104.334.070	1.774	125.281.957,00	1.827	126.426.478,00	1.882	146.394.000,00	1.938	154.130.000,00	1.996	160.295.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	200 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	35.157.840	0	125.281.957,00	0	126.426.478,00	5	146.394.000,00	5	154.130.000,00	5	160.295.000,00			
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	ton	1.721,97	1.585	69.176.230	1.774	125.281.957,00	1.827	126.426.478,00	1.882	127.000.000,00	1.938	128.000.000,00	1.996	132.000.000,00			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan	ton	1.721,97	1.585	69.176.230	1.774	125.281.957,00	1.827	126.426.478,00	1.882	127.000.000,00	1.938	128.000.000,00	1.996	132.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	ton	1.721,97	1.585	69.176.230	1.774	125.281.957,00	1.827	126.426.478,00	1.882	127.000.000,00	1.938	128.000.000,00	1.996	132.000.000,00				
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaku usaha	200 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	35.157.840	-	0,00	-	0,00	5	19.394.000,00	5	26.130.000,00	5	28.295.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Kota yang Terfasilitasi																		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	200 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	35.157.840	-	0,00	-	0,00	5	19.394.000,00	5	26.130.000,00	5	28.295.000,00				

Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025



Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah



Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT - Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap 	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Daerah Kabupaten/ Kota - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT - Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) - Penetapan Persyaratan dan Prosedur	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT - Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>Pendidikan dan Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota- Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota- Penyediaan Sarana Prasarana Unit	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan 	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	NTN	%	100,30	100,60	100,90	101,20	101,50	101,80	
2	NTPi	%	100,25	100,50	100,75	101,00	101,25	101,50	
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
4	Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan	%	3	3	3	3	3	3	
5	IKM	Nilai	90	93	93,50	94	94,50	95	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2025

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Perikanan



Kabupaten Pacitan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kot a (Sumber data: One data KKP)	ton	15.005	12.777	12.987	13.237	13.493	13.756	

Sumber: Permendagri No 18 Tahun 2020

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pelaksanaan penganggaran pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan perangkat



daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.



5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN**